Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kecamatan Antapani

Tahun 2018

KATA PENGANTAR

LKIP 2018

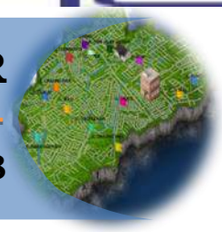

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT., karena atas rahmat dan karuniaNya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Antapani Kota Bandung Tahun 2018.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, yang disebabkan oleh berbagai keterbatasan yang ada pada kami, namun demikian kekurangan dan kelemahan yang masih terdapat dalam dokumen pelaporan ini tidak berarti bahwa kami tidak akan dapat mencapai kinerja yang diharapkan, tetapi dari keadaan ini kami mempunyai keyakinan dan optimis, bahwa segala kekurangan dan permasalahan akan dapat diatasi dengan bekerja lebih keras lagi, yang pada gilirannya akan tercipta kinerja organisasi yang tinggi.

Akhirnya kami berharap semoga Allah SWT. selalu melindungi dan memberikan petunjuk pada jalan yang diridoiNya serta memberikan kesehatan pada kita semua, sehingga dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Bandung, 18 Januari 2019

CAMAT ANTAPANI

Drs. H. Rd. SARJANI SALEH, M.Si

Pembina Tk 1

NIP. 19660225 198812 1 001

RINGKASAN EKSKLUSIF

LKIP 2018

Perubahan paradigma dari *stering* kepada *empowerment* seperti kondisi dewasa ini, telah menuntut aparatur pemerintah kepada posisi yang lebih berorientasi pada pelayanan masyarakat secara prima. Kondisi demikian tidak hanya dipengaruhi oleh semangat desentralisasi dan otonomi daerah semata, terutama pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Namun lebih dari itu, dipacu pula oleh tuntutan eksternal yang mengharuskan aparatur pemerintah memiliki keunggulan kompetitif (competitive advantage) dalam mendorong peningkatan pelayanan masyarakat baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Arah kebijakan desentralisasi dan demokratisasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta tuntutan era global yang semakin dominan memerlukan tersedianyan aparat pemerintah yang kuat dan berdaya saing tinggi. Sementara itu kunci keberhasilan dalam persaingan dewasa ini adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia sebagai representasi pembuat buah karyanya.

Pada sisi pemerintah yang kompetitif tersebut, pemberian otonomi luas kepada Kabupaten/Kota dimaksudkan agar masing-masing Kabupaten/Kota secara otonom mampu mengemas diri untuk memasuki era kompetisi. Dalam kontek kompetisi itulah kemampuan kompetitif pemerintah ditentukan oleh tersedianya sumberdaya manuasia aparatur yang profesional dan berkualitas.

Untuk itu Kecamatan Antapani harus memiliki Visi dan Misi karena dengan adanya visi diharapkan langkah operasional selanjutnya dapat dibuat dengan mengacu pada Visi Organisasi yang telah disusun, dalam upaya mendukung terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Kota Bandung yang akan datang, adapun Visi Kecamatan Antapani adalah :

Visi Kecamatan Antapani Kota Bandung Tahun 2013-2018 adalah : ***"Mewujudkan Kecamatan Antapani Sebagai Wilayah Pemukiman Yang Berwawasan Lingkungan, Menciptakan Pemerintah Yang Kredibel , Professional Dalam Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat"***

Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut, Kecamatan Antapani mempunyai Misi sebagai Berikut :

1. Mewujudkan Pelayanan Publik yang JUARA (Jujur, Unggul, Amanah, Ramah dan Adil)

Penyampaian LKIP ini merupakan salah satu pertanggung jawaban tahunan, guna menindaklanjuti Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
RINGKASAN EKSKLUSIF ii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR GRAFIK v
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR GAMBAR viii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 LatarBelakang 1
1.2 Gambaran Umum Kecamatan 3
1. KeadaanPenduduk 4
1.3 TugasPokok dan Fungsi 5
1.4 Isu Strategis 10
1. Reformasi Birokkrasi Pemerintah Derah dan Penataan Manajemen Publik (Pelayanan Publik) 12
2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah, Pengelolaan Keuangan dan Barang 13
1.5 LandasanHukum 15
1.6 Sistematika 16
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 17
2.1 Perencanaan Strategis 17
2.1.1 Rencana Strategis 17
- Visi 18
- Misi 18
- Tujuan dan Sasaran 19

2.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Antapani 24
2.1.3 Indikator Kinerja Utama..... 25
2.1.4 Rencana Kinerja 2015 26
2.1.5 PerjanjianKinerja 2015 27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 34
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja 34
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama 36
3.3 Pengukuran Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 38
3.4 Akuntabilitas Keuangan 86
3.5 Prestasi dan Penghargaan 94
BAB IV PENUTUP 95
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GRAFIK

3.1 Perbandingan Rata-Rata Nilai Unsur Pelayanan Kecamatan Antapani Tahun 2015 dan 2014 38

3.2 Perbandingan Perkembangan Nilai IKM Tiap Triwulan Pada Tahun 2015 ... 40

3.3 Perbandingan Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat dengan Kecamatan Lainnya di Kota Bandung 41

3.4 Perbandingan Indikator Prosentase Keluhan/Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti dengan Kecamatan Se Kota Bandung 44

3.5 Perbandingan Indikator Prosentase Keluhan/Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti dengan Kecamatan Se Kota Bandung 45

3.6 Prosentase Pelayanan Administrasi umum lainnya 77

3.7 Perbandingan Indikator Indikator Rasio Anggota Linmas di Kecamatan Antapani..... 81

3.8 Fluktasi Perbandingan Capaian Tahun Tahun Sebelumnya..... 82

3.9 Perbandingan Capaian Nilai AKIP Tahun 2015 dan Tahun 2014..... 86

DAFTAR TABEL

2.1 Tujuan 19
2.2 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Sebelum Reviu dan Setelah Reviu Kecamatan Antapani Kota Bandung 22
2.4 Rencana Kinerja Tahun 2015 Kecamatan Antapani 26
2.5 Perjanjian Kinerja Hasil Reviu Kecamatan Antapani Tahun 2015 28
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Antapani Kota Bandung Tahun 2015 32
3.2 Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Antapani Kota Bandung Tahun 2015..... 33
3.3 Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Antapani Kota Bandung Tahun 2015..... 34
3.4 Pencapaian Target Misi 35
3.5 Kategori Pencapaian Indikator Sasaran 35
3.6 Analisa Pencapaian Sasaran 1 36
3.7 Nilai Unsur Pelayanan di Kecamatan Antapani Tahun 2015 dibandingkan dengan Tahun 2014 37
3.8 Rekapitulasi Pengaduan Kecamatan Antapani Tahun 2015 42
3.9 Nilai Standar Kepatuhan Pelayanan Publik Kecamatan Antapani..... 48
3.10 Perbandingan Sarana Khusus Bagi Pengguna Layanan Berkebutuhan Khusus Tahun 2014 54
3.11 Sarana Khusus Bagi Pengguna Layanan Berkebutuhan Khusus Tahun 2015 54
3.12 Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Sasaran Pertama "Terwujudnta Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik" 59
3.13 Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan Antapani 61
3.14 Data Prosentase Pelayanan Administrasi Kependudukan Tepat Waktu 63
3.15 Data Prosentase Waktu Pelayanan Administrasi Umum Lainnya Tepat Waktu..... 67
3.16 Data Prosentase Kelurahan 71
3.17 Prosentase RW Juara di Kecamatan Antapani Tahun 2014..... 74

3.18 Cheklist Lembaga Kemasyarakatan Aktif di Kecamatan Antapani Tahun 2015 87
3.19 Rasio Anggota Linmas di Kecamatan Antapani Tahun 2014 85
3.20 Pencapaia Indikator sasaran meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Antapani Tahun 2014 dibandingkan Target Akhir Renstra Kecamatan Antapani Kota Bandung Tahun 2013-2018 89
3.21 Program dan Kegitan yang Menunjang Capaian Sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan Antapani 92
3.22 Analisis Pencapaian Sasaran 3 Meningkatnya Akuntablitas Kinerja Birokrasi 96
3.23 Nilai Evaluasi Akip Kecamatan Antapani Tahun 2015 97
3.24 Persentase Temuan Inspektorat/BPK yang Telah ditindaklanjuti Kecamatan Antapani Tahun 2014 dan 2013 105
3.25 Pencapaian Indikator Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Antapani Tahun 2015 dibandingkan Target Akhir Renstra Kecamatan Antapani Kota Bandung Tahun 2018 107
3.26 Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi 88
3.27 Realisasi Anggaran BTL, BL dan Belanja Pemeliharaan Kantor Kecamatan Antapani Tahun Anggaran 2015..... 88
3.28 Pagu dan Realisasi Anggaran Kecamatan Antapani Kota Bandung Tahun 2018 .....
3.29 Pagu dan Realisasi Anggaran Kecamatan Antapani Kota Bandung Persasaran Tahun 2018..... 89
3.30 Pagu dan Realisasi Misi Kecamatan Antapani Kota Bandung Tahun 2018..... 90
3.31 Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Misi Kecamatan Antapani Kota Bandung Tahun 2018..... 92
3.32 Penyerapan Anggaran pada Setiap Misi Kecamatan Antapani Kota Bandung Tahun 2013-2018..... 92
3.32 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya..... 92
3.33 Daftar Prestasi dan Penghargaan yang diperoleh oleh Kecamatan Antapani..... 94

DAFTAR GAMBAR

3.1 Pengaduan Masyarakat dari Aplikasi LAPOR..... 43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Antapani selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran

serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Antapani Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Antapani Kota Bandung Tahun 2017 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (G*ood Governance* dan *clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Antapani Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Antapani Kota Bandung Tahun 2017 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Gambaran Umum Kecamatan Jumlah seluruh Pegawai Negeri Sipil pada Kecamatan Antapani Kota Bandung sebanyak 43 orang, terdiri dari Pejabat Struktural dan pelaksana di kecamatan dan kelurahan kelurahan se Kecamatan Antapani :

Gambar 1.1

Profil Demografi Kepegawaian Kecamatan Antapani

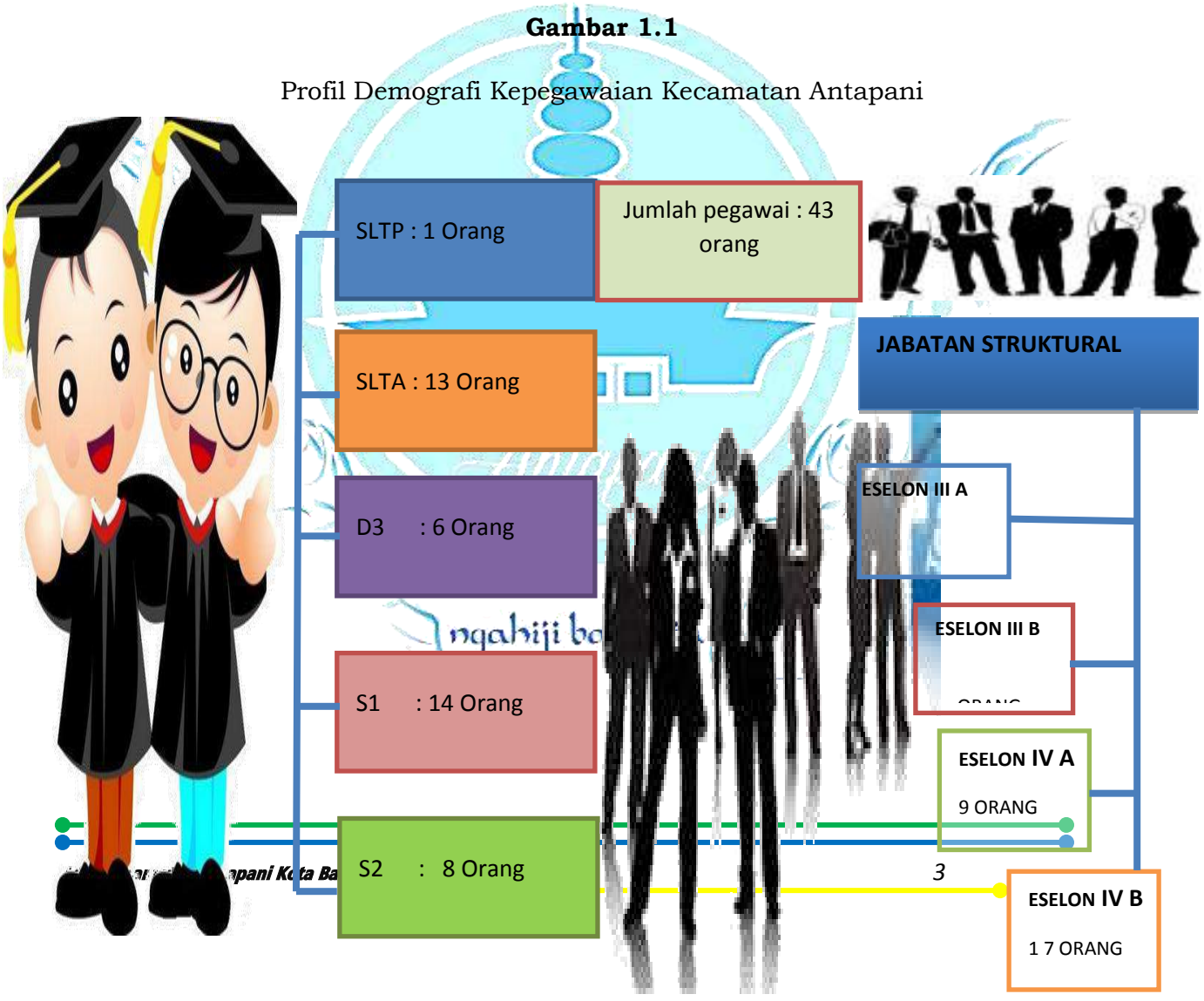

1.2 Gambaran umum Kecamatan Antapani

Demografi dan Geografi Kecamatan Antapani

Secara geografis Kecamatan Antapani terletak disebelah Timur Kota Bandung dengan luas wilayah 400,543 ha. dengan kepadatan penduduk rata-rata 147 jiwa per ha. Wilayah Kecamatan terbagi dalam 4 kelurahan, 62 rukun warga dan 315 rukun tetangga.

Adapun kelurahan-kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Antapani adalah sebagai berikut:

1) Kelurahan Antapani Wetan
2) Kelurahan Antapani Kulon
3) Kelurahan Antapani Tengah
4) Kelurahan Antapani Kidul

Kecamatan Antapani merupakan salah satu kecamatan dari 30 kecamatan yang ada di Kota Bandung yang diresmikan pada tanggal 12 April 2007 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jl. Jend. A.H. Nasution (Kec. Mandalajati);
- Sebelah Timur : Kali Cikeley (Kec. Arcamanik);
- Sebelah Selatan : Rel Kereta Api (Kec. Buah Batu);
- Sebelah Barat : Kali Cidurian (Kec. Kiaracondong)

Keadaan Penduduk

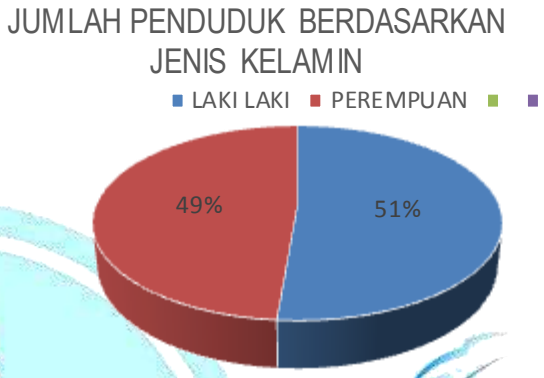

Jumlah Kepala Keluarga : 16.688 umpi

Jumlah Penduduk :

Laki-laki : 35.988 jiwa (51,33%)

Perempuan : 34.122 jiwa (48,67%)

Jumlah : 70.110 jiwa

Data mengenai penduduk dikecamatan Antapani dapat dilihat dari grafis berikut :

Gambar 1.2

Profil Kependudukan Kecamatan Antapani

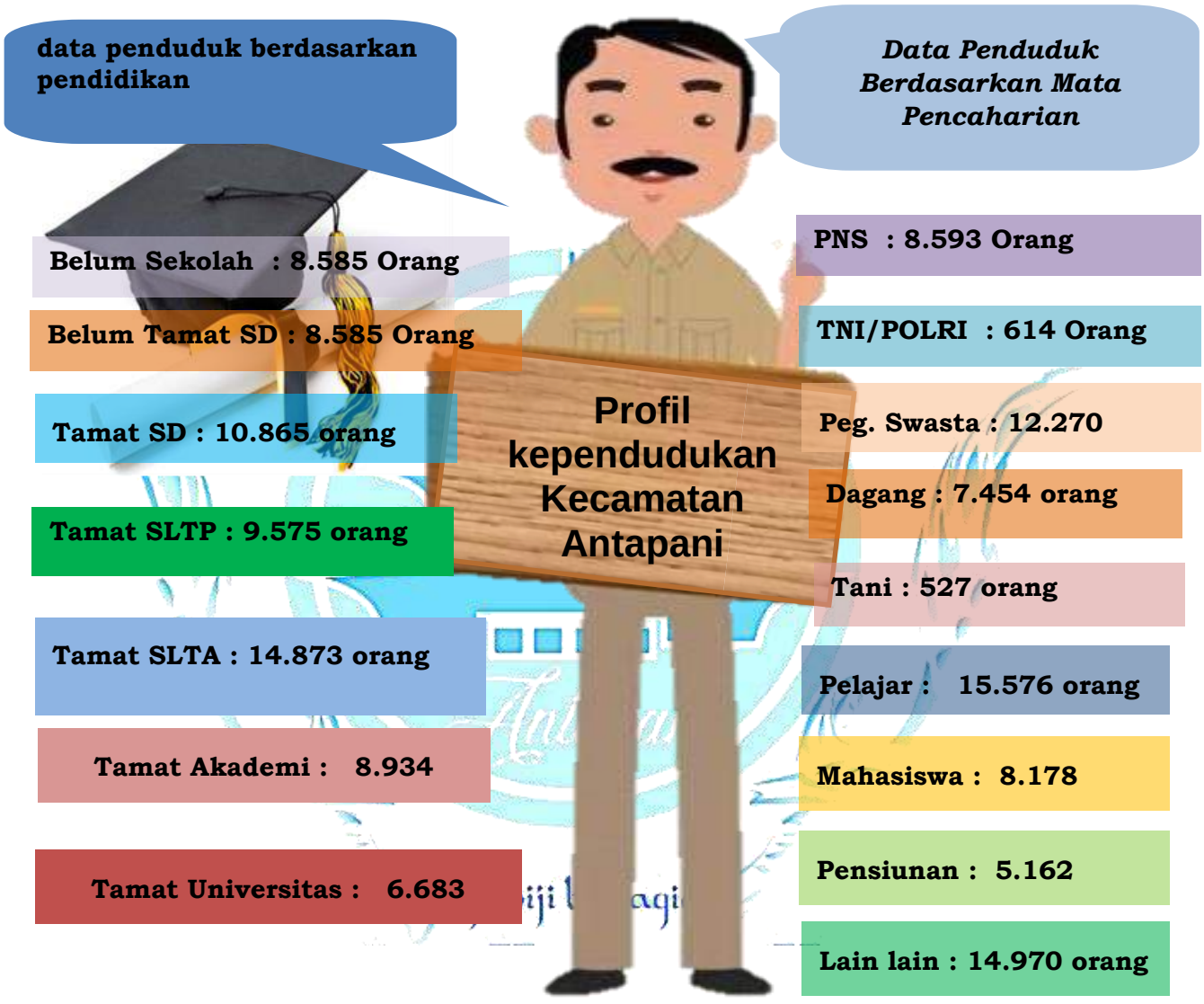

Sumber : Profil Kecamatan Antapani 2018

Adapun Fasilitas Umum yang terdapat di Kecamatan Antapani dapat diuraikan sebagai berikut :

Gambar 1.3

Profil sarana pendidikan Kecamatan Antapani

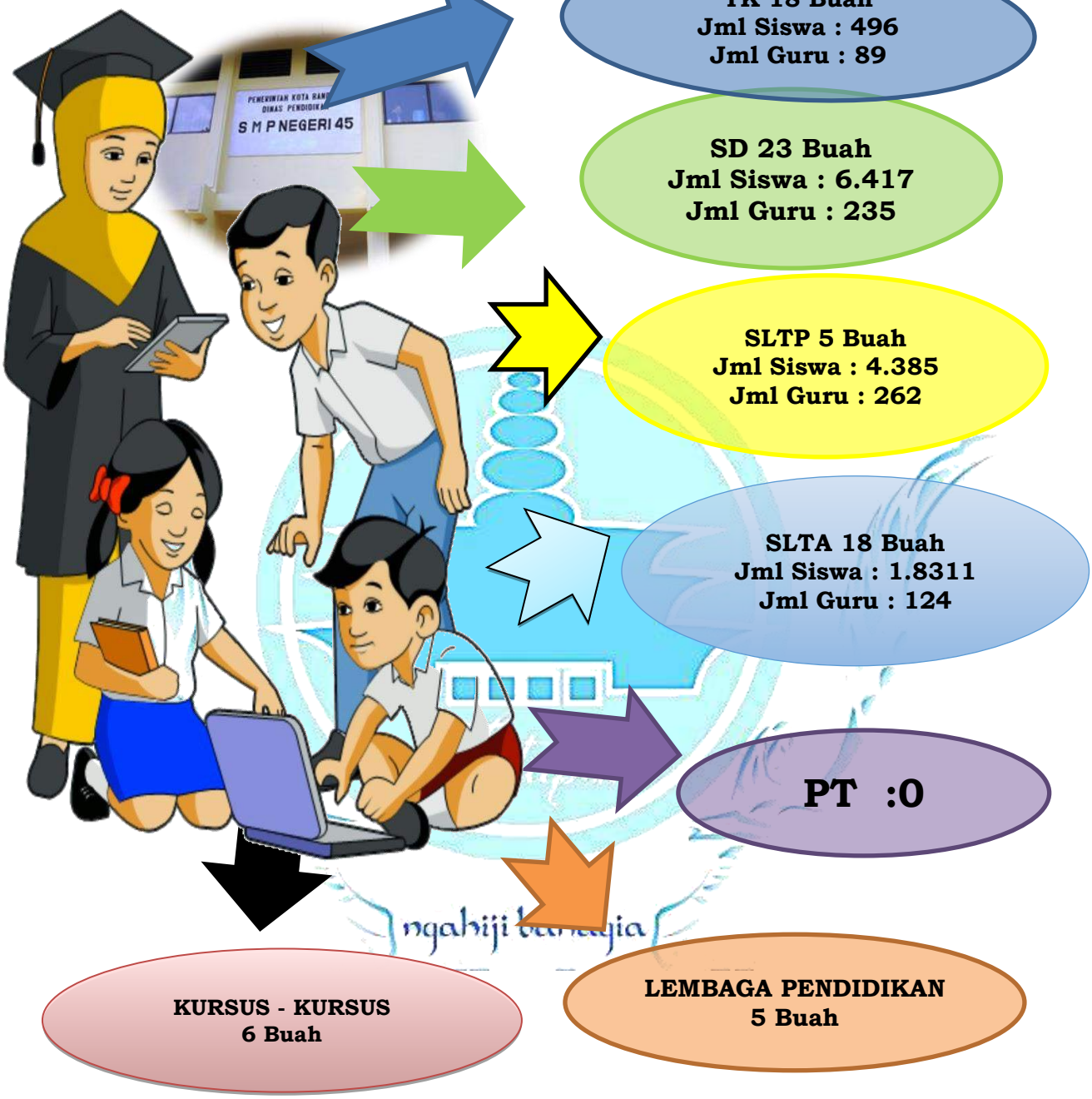

Gambar 1.4

Profil sarana Kesehatan dan KB Kecamatan Antapani

KELUARGA BERENCANA

KESEHATAN

Prasarana	Jumlah
Rumah Sakit	1
Rmah Bersalin	2
Dokter Umum	28
Dokter Anak	2
Dokter Kandungan	4
Dokter Gigi	20
Dokter Spesialis Lainnya	4
Dokter Hewan	-
Puskesmas	3
Klinik / Balai Pengobatan	-
Apotik	11
Toko Obat	-
Posyandu	67

Uraian	Jumlah
Jumlah Pos / KB	62
Jumlah PUS	10.064
Jumlah PUS masuk KB	7.199
Jumlah Akseptor KB	7.199
IUD	925
MOW	2.840
MOP	210
KONDOM	2.947
IMPLAN	31
SUNTIK	169
PIL	3.353
KB MANDIRI	77
KLINIK KB PEMERINTAH/PUSKESMAS	3

Gambar 1.5

Profil sarana ***Prasarana Ibadah Perumahan dan Hiburan*** Kecamatan Antapani

SARANA IBADAH 1

PRASARANA	JUMLAH
Mesjid	72
Surai/Mushola	12
Gereja	1
Vihara	-

SARANA HIBURAN 3

PRASARANA	JUMLAH
Taman	6
Tempat Pertunjukan Tradisional	-
Toko Cinderamata/Souvenir	2
Hotel	-
Penginapan/Losmen	1
Sanggar Seni	1
Bioskop	-

SARANA PERUMAHAN

PRASARANA	JUMLAH
Permanen	27.466
Semi Permanen	2.439
Tidak Permanen	114

Gambar 1.6

Profil sarana ***Prasarana Transportasi*** Kecamatan Antapani

SARANA TRANSPORTASI

Lalu lintas yang digunakan di Wilayah Kecamatan Antapani sepenuhnya (100%) melalui darat. Dengan daya dukung sarana terdiri dari :

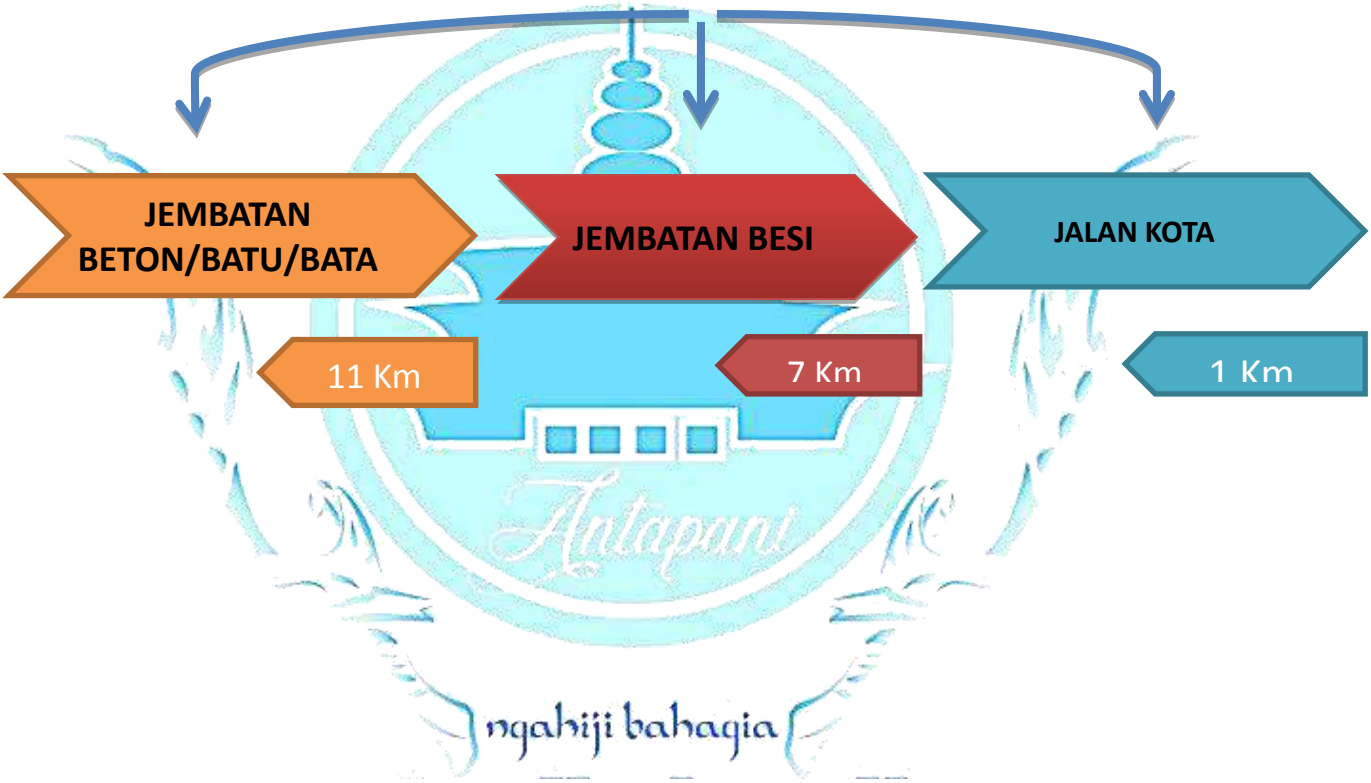
JEMBATAN BETON/BATU/BATA
JEMBATAN BESI
JALAN KOTA
11 Km
7 Km
1 Km

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114. Yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 08 Tahun 2016 tentang (SOTK SKPD) Pembentukan Dan Susunan Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung , Kecamatan mempunyai tugas dan kewajiban Membantu Walikota dalam mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

1.4Isu Strategis

Pemerintah Kecamatan Antapani Kota Bandung dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Antapani Kota Bandung pada tahun 2014 - 2018 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kota Bandung. Secara umum, isu dan

permasalahan yang dihadapi antara lain :

1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
2) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
3) Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
4) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.
5) Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RT RW Kota Bandung yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Antapani Kota Bandung, sebagai berikut :

1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kota Bandung dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya,

dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Pemerintah Kecamatan Antapani Kota Bandung dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan Penataan Organisasi Manajemen Publik (Pelayanan Publik)

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah membangun sistem dan budaya pelayanan publik yang prima.

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good* governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem peyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai *stakeholder*, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai sebagai *shareholder*.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

2. Janji Walikota dan Wakil Walikota terpilih

Hal penting yang tercantum dalam RPJMD Kota Bandung 2013 - 2018 adalah janji-janji politik selama masa kampanye dari Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu sebagai berikut

Tabel 1.2
Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

No.	Aspek	Indikator
1	***BANDUNG SEHAT***	1. Asuransi Kesehatan 2. *Ambulance* gratis 3. Santunan Kematian Rp. 2 juta/jiwa 4. Puskesmas gratis dan pelayanan 24 jam
2	***BANDUNG RESIK***	1. Bebas Sampah dalam 2 Tahun 2. Bebas Banjir dalam 3 Tahun 3. Jalan Mulus dan Caang dalam 3 Tahun 4. Bebas Macet dalam 4 Tahun
3	***BANDUNG NYAMAN***	1. Sarana olahraga/taman bermain di setiap RW 2. Penyediaan sarana air bersih 3. Perbaikan 10.000 rumah tidak layak huni 4. Bantuan 100 juta/RW/tahun 5. Bantuan 100 juta PKK/kelurahan/tahun 6. Bantuan 100 juta/karang taruna kelurahan/tahun

No.	Aspek	Indikator
4	***BANDUNG SEJAHTERA***	1. Menciptakan 100.000 wirausahawan 2. Menciptakan 250.000 lapangan pekerjaan baru 3. Bantuan 100.000 beasiswa untuk siswa SD, SMP, SMU dan mahasiswa per tahun 4. Bantuan keuangan untuk guru honorer, guru madrasah, dan tempat ibadah 5. Subsidi Harga sembako dan gas 3 kg

Gambar 3.1

Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Bandung Resik

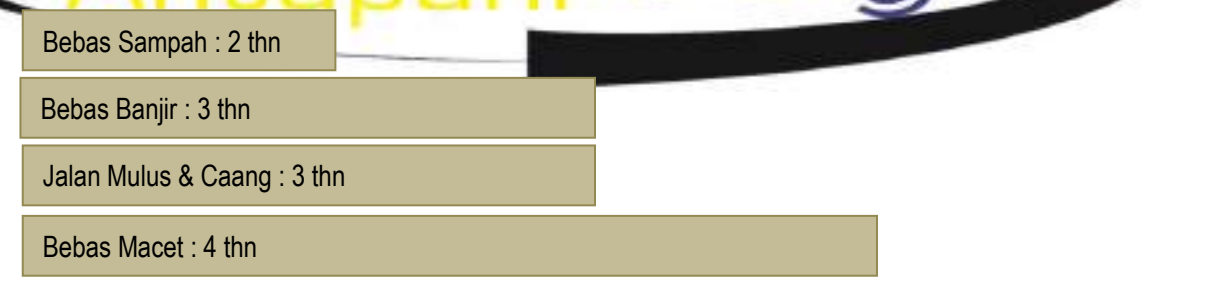

Bandung Sehat

- Asuransi Kesehatan
- Ambulance gratis
- Santunan Kematian Rp. 2 juta/jiwa
- Puskesmas gratis dan pelayanan 24 jam

Bandung Nyaman

- Sarana olahraga/taman bermain di setiap RW
- Penyediaan sarana air bersih
- Perbaikan 10.000 rumah tidak layak huni
- Bantuan 100 juta/RW/tahun
- Bantuan 100 juta PKK/kelurahan/tahun
- Bantuan 100 juta/karang taruna kelurahan/tahun

Bandung Sejahtera

- Menciptakan 100.000 wirausahawan
- Menciptakan 250.000 lapangan pekerjaan baru
- Bantuan 100.000 beasiswa untuk siswa SD, SMP, SMU dan mahasiswa per tahun
- Bantuan keuangan untuk guru honorer, guru madrasah, dan tempat ibadah
- Subsidi Harga sembako dan gas 3 kg

Sumber : Bappeda Kota Bandung 2013

1.5Landasan Hukum

LKIP Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan NegaraYang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 - 2018.

1.6 Sistematika

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Antapani Kota Bandung Tahun 2014 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan PeLaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan masih mengacu pada Peraturan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan PeLaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan PeLaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. Perencanaan Strategis

2.1.1 Rencana Strategis Sebelum Revisi

Rencana Strategis Kecamatan Antapani Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Antapani Kota Bandung. Rencana Strategis Kecamatan Antapani Kota

Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Antapani Kota Bandung Nomor 800/026 – Kec. Atp Tahun 2014 tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Antapani Kota Bandung Tahun 2013-2018. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Antapani Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Antapani Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018.

Penyusunan Renstra Kecamatan Antapani Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Antapani Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Antapani Kota Bandung dan *stakeholder.*

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Antapani Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Antapani Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Antapani Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Antapani Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera, “Bandung Juara”.

Visi Kecamatan Antapani Kota Bandung Tahun 2017-2018 sesuai dengan **Revisi Renstra Kecamatan Antapani** adalah : ***"Mewujudkan Kecamatan Antapani Sebagai Wilayah Pemukiman Yang Berwawasan Lingkungan, Menciptakan Pemerintah Yang Kredibel , Professional Dalam Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat"***

1. Misi

Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut, Kecamatan Antapani mempunyai Misi sebagai Berikut :

1. Mewujudkan Pelayanan Publik yang JUARA (Jujur, Unggul, Amanah, Ramah dan Adil)
2. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kecamatan yang efektif, transparan, dan akuntabel

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Tabel 2.1

TUJUAN

Misi	Tujuan
1. Mewujudkan Pelayanan Publik yang JUARA (**Jujur, Unggul, Amanah, Ramah dan Adil**)	1 **Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayan Publik di Kecamatan dengan Membangun Sistem dan Budaya Pelyanan Publik yang** JUARA (Jujur, Unggul, Amanah, Ramah dan Adil)
2 Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kecamatan	2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Adapun untuk indikator Tujuan nya adalah sebagai berikut :

2. **Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayan Publik di Kecamatan dengan Membangun Sistem dan Budaya Pelayanan Publik yang JUARA (Jujur, Unggul, Amanah, Ramah dan Adil),** indikator dari tujuan 1 ini adalah :
   a. Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat
   b. Prosentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik
   c. Prosentase RW Juara
   d. Prosentase Lembaga kemasyarakatan Aktif
3. **Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan**

Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Bandung Tahun 2013 - 2018 sebanyak 2 (dua) sasaran strategis.

Sasaran dari tujuan 1
a. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
b. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan.
Sasaran dari tujuan 2
a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi.

2.1.2 Rencana Strategis Setelah Revisi

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dengan adanya revisi RPJMD maka Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Antapani setelah Revisi menjadi berikut

MISI :

MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG JUARA (JUJUR, UNGGUL, AMANAH, RAMAH DAN ADIL)

TUJUAN :

Membangun Sistem dan Budaya Pelayanan Publik yang **JUARA (Jujur, Unggul, Amanah, Ramah dan Adil)**

Sasaran dari tujuan setelah Revisi RPJMD di atas dijabarkan sebagai berikut:

1. **Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**
2. **Meningkatnya pemberdayaan masyarakat**

Tabel 2.2

Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Antapani

Setelah Revisi RPJMD

Tujuan	Sasaran
1. Membangun Sistem dan Budaya Pelayanan Publik yang JUARA (Jujur, Unggul, Amanah, Ramah dan Adil)	1. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana / instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencakan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Antapani Kota Bandung setelah Revisi Renstra adalah sebanyak 2 (Dua) indikator sedangkan setelah Revisi RPJMD Indikator pada masing masing untuk menunjukan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

Indikator Sasaran dan Sasaran Jangka Menengah

Kecamatan Antapani Kota Bandung Setelah Revisi RPJMD

Sasaran	Indikator Kinerja
1. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Meningkatknya pemberdayaan masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Bandung Tahun 2017 - 2018 sebanyak 2 (dua) sasaran strategis.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan revisi RPJMD terhadap Indikator Kinerja, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan Revisi dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Kecamatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung dengan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil revisi tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Antapani Tahun 2017.

Hasil revisi pada rencana strategis Kecamatan terutama merevisi indicator kinerja pada seluruh sasaran, selain berkurangnya jumlah indicator juga merevisi penempatan indicator kinerja strategis menjadi lebih menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Kecamatan Antapani Tahun 2017 - 2018.

1. Rekomendasi Bappeda Kota Bandung

- Pada formulasi pengukuran untuk tiap-tiap kriteria indikator dibuat rumus masing-masing.
- Indikator yang merupakan output kegiatan disarankan untuk dihapus.

2. Rekomendasi Narsumber Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

- Penggabungan beberapa indikator menjadi indicator yang dapat menggambarkan cakupan kinerja sasaran penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan
- Beberapa indikator dihapus karena merupakan output kegiatan
- Kriteria indikator lembaga kemasyarakatan yang aktif perlu ditambah kriteria yang lainnya
- Penggabungan kriteria dalam satu indikator kinerja
- Cascading pada semua indikator harus dibagi habis ke masing-masing kepala seksi dan Lurah dengan penghitungan bobot dari masing-masing capaian kinerja.

Berdasarkan hasil revisi dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Kecamatan tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

sebelum reviu dan setelah revisi

Kecamatan Antapani Kota Bandung

NO	SEBELUM REVSI										SETELAH REVISI							
	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN					TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
						2014	2015	2016	2017	2018					2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21
1.	**Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Prima di Kecamatan dan Keluraha n**	1.Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Prima di Kecamatan dan Keluraha n	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	71,25	82,2	**82,7**	83,5	84	**Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Prima di Kecamatan dan Keluraha n**	**Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Prima di Kecamatan dan Keluraha n**	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai				**80**	80,5

ngahiji bahagia

				Persentase Keluhan/ pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti	%	100	100	**100**	100	100								
				Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI	Nilai	850	875	**900**	925	950								
											Meningkatknya pemberdayaan masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%				**75**	77,5

				Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	%	60	75	**80**	85	90	
		2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Capaian Kinerja TUP Kecamatan: Bidang pemerintahan, perekonomian, Pembangunan, Lingkungan Hidup, Pendidikan dan kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta pelayanan	2. Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu	%	60	75	**80**	85	90	
				3. Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik	%	25	50	**75**	100	100	
				4. Persentase RW Juara	%	30,77	51,92	**65,38**	78,85	92,31	

ngahiji bahagia

				5. Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif	%	53,33	66,66	**80**	93,33	100	
				6. Rasio Anggota Linmas	Rasio	1,2:1	1,3:1	**1,5:1**	1,6:1	1,8:1	
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan	3. Nilai AKIP Kecamatan	1. Nilai AKIP Kecamatan	Nilai	50	60	**70**	75,1	78	
			4. Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	2. Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	%	100	100	**100**	100	100	
			5. Tertib administrasi barang/asset daerah								

2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Antapani

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Kecamatan Antapani Kota Bandung mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi serta berdasarkan arah kebijakan yang ditetapkan disusun program-program pembangunan. Berdasarkan pada Peraturan Walikota Bandung No. 542/2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan, Kecamatan Antapani melaksanakan beberapa Program, diantaranya

1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
6. Program Inovasi Pembangunan Pemberdayaan Kewilayahan
7. Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan

Program yang disajikan di dalam LKIP adalah **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Program Inovasi Pembangunan Pemberdayaan Kewilayahan** dan **Program peningkatan peran Kecamatan dan Kelurahan** saja, dimana penyusunan program dan kegiatan ini disesuaikan dengan alur atau mekanisme perencanaan mulai dari MUSRENBANG hingga penetapan skala prioritas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

2.1.4 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor : 050/Kep.966-Orpad/2013 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bandung 2013-2018. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Bersamaan dengan reviu rencana strategis Kecamatan juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indicator kinerja agar berorientasi hasil.

Adapun Indikator Kinerja Utama Kecamatan Antapani adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.5

Tabel Indikator Kinerja Utama Kecamatan Antapani 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public	Rata Rata Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	Angka	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sesuai amanat UU no.25/2009 tentang pelayanan publik dan PP 19/2008 tentang kecamatan maka kecamatan sebagai lembaga pelayanan publik berorientasi pada kepuasan masyarakat melalui pengukuran kepuasan pelayanan dimana masyarakat yang dimaksud adalah warga masyarakat kecamatan	Sesuai dengan SK Menpan No.16 Tahun 2014 tentang survey kepuasan masyarakat dan SK Menpan No. 25/2004 ***Rata Rata IKM Kecamatan dan Kelurahan***	Responden adalah penerima pelayanan publik kecamatan dan kelurahan pada tahun pengukuran. Responden secara acak berstrata mewakili jumlah kelurahan dan jenis pelayanan di lingkungan kecamatan
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	Pemberdayaan Masyarakan menjadi Tupoksi Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 1407 Tahun 2016 tentang (SOTK SKPD) dan menjadi IKU Karena tercantum dalam Janji Walikota dan Wakil Walikota	% Rata rata RW JUARA + LKK JUARA dan SISKAMLING AKTIF	Sesuai Kriteria RW Juara, Kriteria LKK Aktif dan Kriteria Siskamling Aktif

				Terpilih Mengenai Program PIPPK		

2.1.5 Rencana Kinerja 2018

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Antapani Kota Bandung Tahun 2018 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Antapani Kota Bandung Tahun 2014-2018, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018, Kecamatan Antapani Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.6

Perjanjian Kinerja Kecamatan Antapani Kota Bandung

Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Rata Rata Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	80.50

2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	77.50

Adapun Bila dilihat Rencana Kinerja Tahunan 2017-2018 Kecamatan Antapani Setelah dilakukannya Revisi RENSTRA Kecamatan sebagai konsekuensi adanya perubahan RPJMD Kota bandung menjadi Sebagai Berikut :

Tabel 2.7

Rencana Kinerja tahunan 2017- 2018

Kecamatan Antapani hasil Revisi Renstra

TUJUAN	SASARAN	SETELAH REVISI						
		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Prima di Kecamatan dan Kelurahan	**Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Prima di Kecamatan dan Kelurahan**	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai				**80**	80,5

	Meningkatknya pemberdayaan masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%				**75**	77,5

2.1.5 Perjanjian Kinerja 2018

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Antapani Kota Bandung Tahun 2016 mengacu pada dokumen Renstra Revisi Kecamatan Antapani Kota Bandung Tahun 2017-2018, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018. Kecamatan Antapani Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.7

Perjanjian Kinerja Hasil Revisi

Kecamatan Antapani Kota Bandung Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAR-GET	RENCANA ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

1.	**Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Prima di Kecamatan dan Kelurahan**	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	**80,50**	**7.715.476.241**
	Meningkatknya pemberdayaan masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	**77,50**	**5.745.595.974**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Antapani Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Antapani Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan PeLaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2013-2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2018. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kecamatan Antapani.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan PeLaporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Tabel 3.1

Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Antapani

Kota Bandung Tahun 2018

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Antapani Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Revisi 2017-2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2018. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2018 hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama SKPD berdasarkan Keputusan Walikota Bandung **Nomor : 090/341-Bag.Orpad/2018**, telah ditetapkan 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Antapani Kota bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Kecamatan Antapani Melalui **Keputusan Camat Antapani Kota Bandung** Nomor : 050/015- Kec.Atp tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bandung. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Antapani Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Antapani Kota Bandung tahun 2014 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Antapani

Kota Bandung Tahun 2018

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Rata Rata Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	Angka	80.5	82.76	**102.81**
2	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	77.50	88.47	**114.15**

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang melebih/melampaui target ditunjukan pada indikator Rata Rata Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan, dengan capaian kinerja **102.81 %**, pada indikator Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, dengan capaian kinerja **114,15 %.**

3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Kecamatan Antapani Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Revisi 2017-2018. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Antapani Kota Bandung Tahun 2014-2018 sebanyak 2 sasaran.

Tahun 2017 adalah tahun ke 4 pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Antapani, dari sebanyak 2 sasaran strategis dengan sebanyak 2

indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Antapani Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Capaian Indikator Kinerja

Kecamatan Antapani Kota Bandung Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Rata Rata Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	Angka	80	82.83	103.54
2	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	75	85.08	113.44

Untuk melihat progress kinerja capaian Sasaran Strategis dan IKU Kecamatan Antapani per Triwulan dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 3.4

Capaian Indikator Kinerja per Triwulan

Kecamatan Antapani Kota Bandung Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
a	B	c	d	E	f	g	H	I	j	K
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public	1.1	Rata Rata Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	Angka	80.5	Triwulan 1	80.5	82.02	101.89	
						Triwulan 2	80.50	83.154	103.30	
						Triwulan 3	80.50	82.83	102.89	
						Triwulan 4	80.50	82.76	102.81	
						Kondisi Akhir (F)		**82.76**	**102.81**	

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
a	B	c	d	E	f	g	H	I	j	K
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	2.1	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	77.50	Triwulan 1	-			
						Triwulan 2	-	-	n/a	
						Triwulan 3	-	-	n/a	
						Triwulan 4	77.50	88.49	114.18	
						Kondisi Akhir (F)				

Beradasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Perangkat Daerah pada beberapa table berikut :

Tabel 3.5

Pencapaian Kinerja Sasaran

Kecamatan Antapani Kota Bandung Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	100.00 %
2	Sesuai Target	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0.00 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 2 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.6

Pencapaian target Misi

No.	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Mencapai Target (<100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	2	2	100,00	0	0	0	0
	Jumlah	2	2	100,00	0	0	0	0

Dari sebanyak 2 sasaran dengan sebanyak 2 indikator kinerja, pencapaian kinerja Kecamatan Antapani Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.7

Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR SASARAN	TINGKAT PENCAPAIAN					
			MELAMPAUI TARGET (>100%)		SESUAI TARGET (=100%)		BELUM MENCAPAI TARGET (>100%)	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	**Sasaran 1**	**1**	1	**102,81**	0	0	0	0

	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Antapani							
2.	**Sasaran 2** Meningkatknya pemberdayaan masyarakat	**1**	1	**114,15**	0	0	0	0

Dari tabel diatas jika dihitung rata-rata maka capaian Misi 1 adalah sebesar **108,48 %** yang berarti telah melebihi target yang telah ditetapkan**.** Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Secara umum Kecamatan Antapani Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2013-2018. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Antapani Kota Bandung Tahun 2013-2018 sebanyak 3 (tiga) sasaran. Sedangkan pada tahun 2017-2018 menjadi 2 (dua) sasaran, adapun perkembangan sasaran dan indikator sasaran selama periode 2013-2018 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.8

PERKEMBANGAN INDIKATOR KINERJA KECAMATAN ANTAPANI 2014 - 2018

No	Tujuan		Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target Per Tahun				
							2014	2015	2016	2017	2018
	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayan Publik di Kecamatan dengan Membangun Sistem dan Budaya Pelyanan Publik yang JUARA	1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.1.1	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	75	82	82.28	N/A	N/A
				1.1.2	Prosentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti	%	N/A	100	100	N/A	N/A
				1.1.3	Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI	Angka	N/A	905	908	N/A	N/A

	(Jujur, Unggul, Amanah, Ramah dan Adil)	1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan.	1.2.1	Prosentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	%	**N/A**	91.80	93.96	**N/A**	**N/A**
				1.2.2	Prosentase waktu pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu	%	**N/A**	100	100	**N/A**	**N/A**
				1.2.3	Prosentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik	%	**N/A**	75	75	**N/A**	**N/A**
				1.2.4	Prosentase RW Juara	%	**N/A**	51.61	77.10	**N/A**	**N/A**
				1.2.5	Prosentase Lembaga kemasyarakatan Aktif	%	**N/A**	70	75	**N/A**	**N/A**
				1.2.6	Rasio Anggota Linmas	ratio	**N/A**	1:01	1:1.10	**N/A**	**N/A**

		1.	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	1.3.1	Rata Rata Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	Angka	**N/A**	**N/A**	**N/A**	80	80.5
		1.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	1.4.1	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	**N/A**	**N/A**	**N/A**	75	77.50
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan yang efektif, transparan, dan akuntabel	2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi.	2.1.1	Nilai Evaluasi AKIP	Angka	52	60	63.10	**N/A**	**N/A**

				2.1.2	Prosentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti		100	100	100	**N/A**	**N/A**

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2018 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 2 sasaran dan sebanyak 2 indikator kinerja dari sebanyak 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Revisi Kecamatan Antapani Kota Bandung tahun 2017-2018, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan public

Pencapaian sasaran ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.9

Analisis Pencapaian Sasaran 1

Meningkatnya kualitas pelayanan publik (2017-2018)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2014		%	Tahun 2015		%	Tahun 2016		%	Tahun 2017		%	Tahun 2018		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Rata Rata ndeks elayanan / ndeks epuasan asyarakat ecamatan an elurahan	Angka	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80	82.83	103.54	80.5	82.76	102.81

Sasaran Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "**Rata Rata Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan**" adalah sebesar 82.76 dari target sebesar 80.5 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 102.81 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Rata Rata Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan" tahun ini menurun 0.73 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 103.54.

Tahun 2018 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Rata Rata Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan" tahun ini adalah sebesar 102.81 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Antapani maka capaian kinerjanya mencapai 102.81 %.

Indikator Rata Rata Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan ini merupakan hasil rata rata nilai IKM dari kecamatan dan kelurahan yang merupakan indikator sasaran yang baru/ setelah reviu renstra, pada tahun 2013 - 2016 indikator tersebut adalah nilain representative IKM Kecamatan antapani saja. Adapun mengenai capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik pada tahun 2013 – 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10

tabulasi Pencapaian indikator indeks kepuasan masyarakat Meningkatnya kualitas pelayanan publik (2013-2016)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2014		%	Tahun 2015		%	Tahun 2016		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	75	80.02	100.02	82	82.02	100.02	82.28	82.29	100.01

Capaian kinerja nyata indikator ***Rata rata Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2018 sebesar 82,76 (tabel 3.9)*** bila dibandingkan dengan Kecamatan lainnya di Kota Bandung adalah sebagai berikut.

Grafik 3.1

Grafik Perbandingan Indeks Pelayanan/ rata rata Indeks Kepuasan Masyarakat dengan Kecamatan Lainnya di Kota Bandung

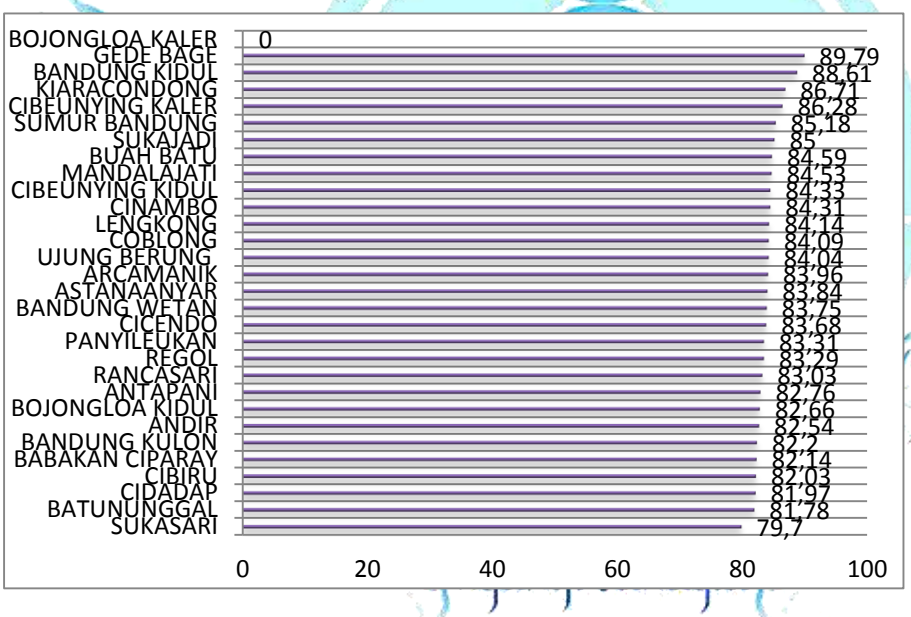

Sumber : http://lakip.bandung.go.id

Dari Grafik diatas dapat dilihat bahwa Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Antapani sudah cukup tinggi dibandingkan dengan beberapa Kecamatan lainnya. tetapi masih dibawah nilai IKM yang tertinggi diperoleh oleh Kecamatan Gede Bage dengan Capaian 89,76 sedangkan yang terendah

adalah Kecamatan Sukasari dengan Capaian 79,70. Kecamatan Antapani sendiri memperoleh rata rata IKM sebesar 82,76 jika dibandingkan dengan Kecamatan lain yang juga terdiri dari 4 (empat) Kelurahan seperti Kecamatan Mandalajati, Kecamatan Panyileukan dan Kecamatan sumur bandung, maka Kecamatan Antapani masih dibawah capaian rata rata IKM dari kecamatan tersebut hal ini disebabkan kondisi kantor Camat dan ruang pelayanan yang relatif kurang representatif. Kondisi kantor Kecamatan Antapani dan Ruang pelayanan dinilai kurang representatif dibandingkan dengan kecamatan lain, hal tersebut dikarenakan dalam DPA Kecamatan Antapani dari tahun 2014 belum menganggarkan perbaikan/ rehab gedung kantor karena keterbatasan dana APBD Kota Bandung.

Akan tetapi yang menjadi nilai posotif adalah Nilai IKM Kecamatan Antapani ini sudah melampaui nilai IKM beberapa Kecamatan yang sudah memiliki ruang pelayanan yang lebih representatif. ***Pelaksanaan hasil survey mandiri yang dilakukan terhadap Aspek Pelayanan di Kecamatan Antapani Dilakukan Pada Setiap Tariwulan dan selalu memiliki nilai yang SANGAT BAIK yaitu*** sebesar 82,76 yang berada dalam Kategori Mutu SANGAT BAIK (A).

Analisis Capaian Indikator Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat

Capaian kinerja nyata indikator ***Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat*** apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya selalu mengalami peningkatan. Walaupun pada tahun 2014-2016 Indeks Kepuasan Masyarakat hanya memperhitungkan IKM Kecamatan saja dan baru pada tahun 2017 capaian indikator Indeks Kepuasan masyarakat ini dilakukan perhitungan secara menyeluruh Kecamatan dan empat Kelurahan dan di hitung rata-rata IKM nya.

Data penunjang capaian kinerja indikator Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari sekretariat Kecamatan Antapani dan Kepala Seksi Pelayanan. Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat secara mandiri oleh Tim yang dibentuk oleh Surat Keputusan Camat Antapani yang dilakukan tiap triwulan pada tahun 2018.

Grafik 3.2

Grafik perkembangan Nilai IKM tiap Triwulan pada Tahun 2018

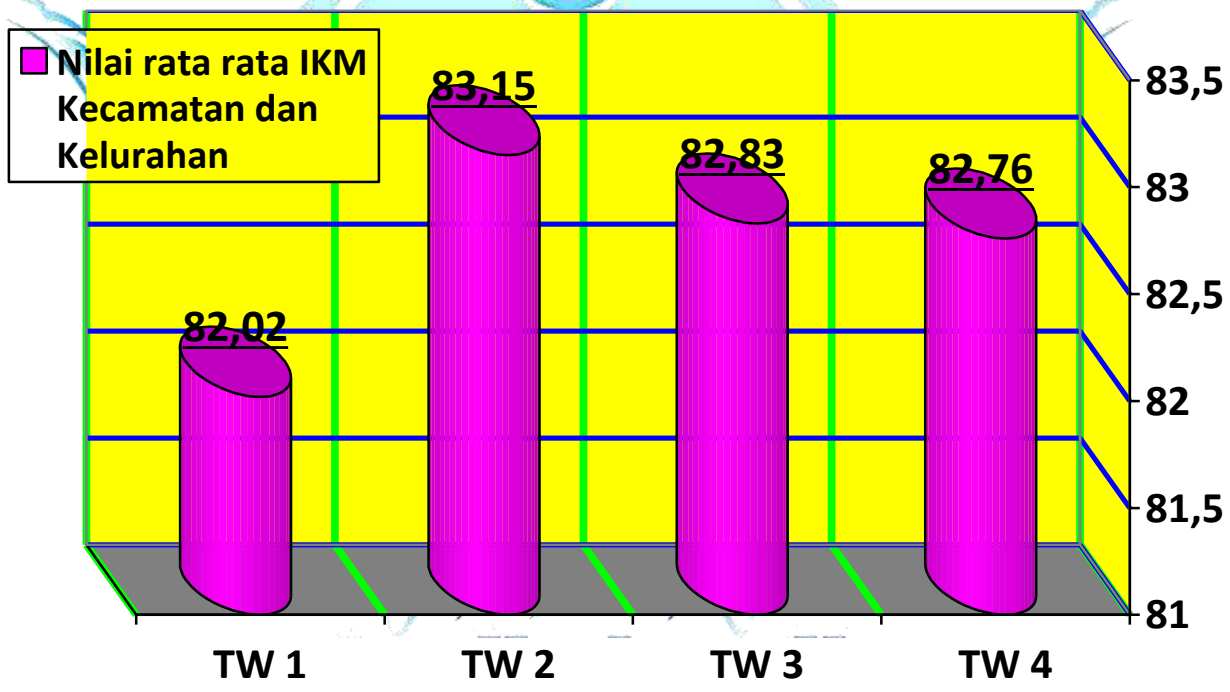

Nilai IKM yang tinggi tersebut pada tahun 2018 ini adalah karena dalam meningkatkan Kualitas Pelayanan kami membuat motto dalam melakukan Pelayanan Kepada Masyarakat Untuk meningkatkan Mutu Pelayanan Publik yaitu **JUARA (Jujur, Unggul, Adil, Ramah dan Amanah)** dan motto tersebut menjadikan budaya kerja bagi para petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan publik.

Sedangkan untuk melihat capaian IKM yang tertinggi di Kecamatan Antapani diantara Kecamatan dan Kelurahan dapat dilihat pada Grafik berikut ini.

Grafik 3.3

Grafik perbandingan Nilai IKM Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2018

Di Kecamatan Antapani

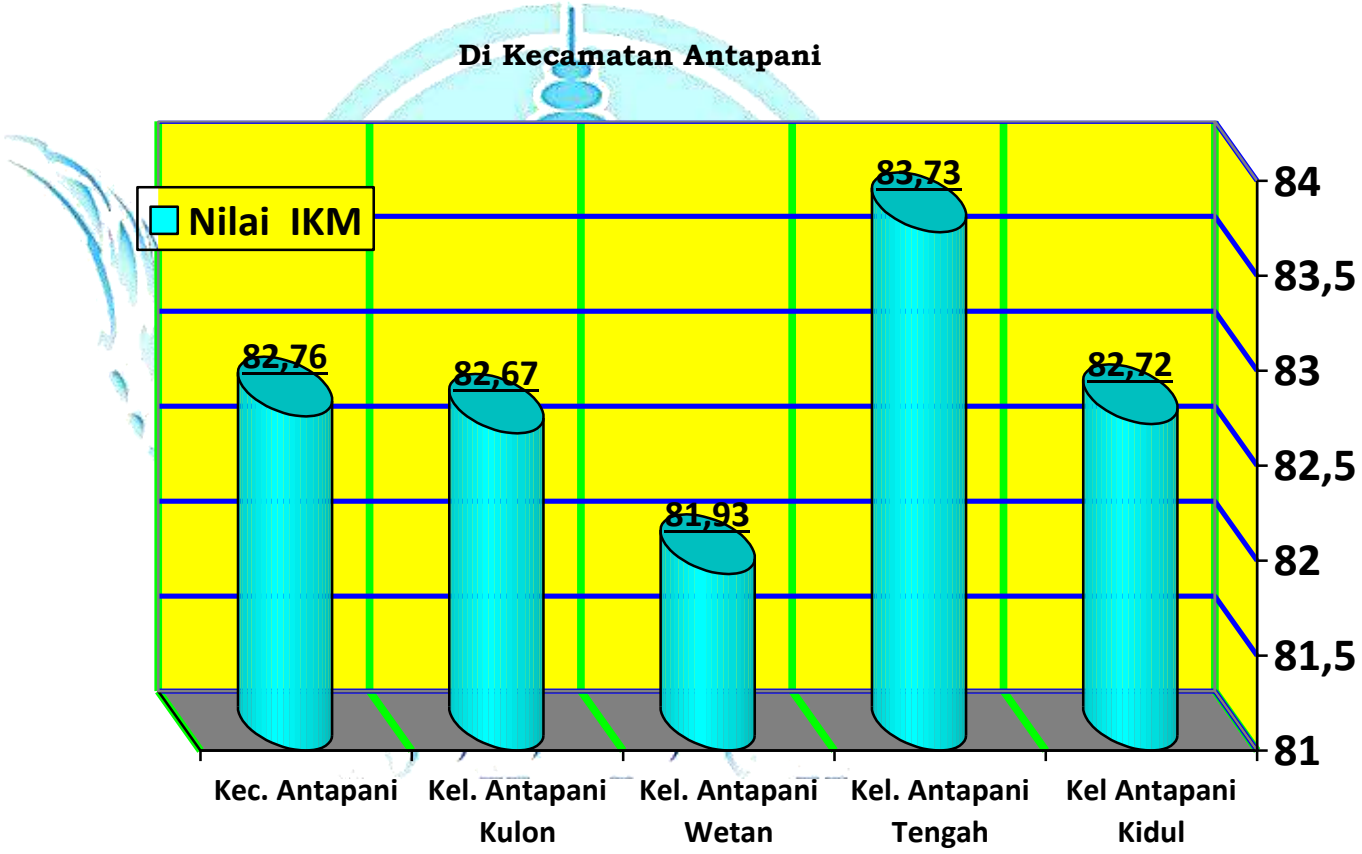

Dari Grafik diatas capaian Nilai IKM yang terbesar di Kecamatan Antapani adalah capaian IKM Kel. Antapani tengah dengan capaian sebesar 83,73 dan yang terendah adalah capaian IKM Kelurahan Antapani Wetan dengan Nilai 81,93. Hal tersebut membuktikan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh Kelurahan Antapani Kulon dan Kelurahan lainya lebih baik dari pelayanan yang dilakukan oleh petugas pelayanan dari Kecamatan Antapani. Capaian yang diraih oleh Kecamatan Antapani lebih rendah

dibandingkan dengan Kelurahan disebabkan karena jumlah pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan lebih banyak dari segi kuantitasnya dan perlu adanya pengecekan ulang dengan teliti oleh petugas pelayanan di Kecamatan karena beberapa produk yang dihasilkan dari pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan memerlukan penelitian yang lebih lanjut karena bias bersinggungan dengan hukum yaitu seperti Domisili Perusahaan, Keterangan Ahli Waris dan bidang pertanahan. Selain itu ada pula anggapan bahwa KTP dan Kartu keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil msih dianggap oleh sebagian besar masyarakat adalah produk dari Kecamatan sehingga kecepatan penerbitan dan keakuratannya dianggap masih menjadi tanggung jawab Kecamatan.

Capaian kinerja sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan masyarakat didukung oleh Program :

No.	PROGRAM	URAIAN/ PENJELASAN
(1)	(2)	(3)
1.	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (program penunjang)**	**Output** dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah tersedianya (jasa komunikasi, sumber daya air, kebutuhan listrik dan internet), jasa kebersihan kantor, jasa perbaikan peralatan kerja, Alat Tulis Kantor (ATK), barang cetakan dan penggandaan, peralatan dan perlengkapan kantor, Bahan bacaan dan Peraturan Perundang- undangan, makanan dan minuman dan Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (program penunjang)**	**Output** dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah Tersedianya Gedung Kantor yang memadai, Kendaran dinas operasional yang memadai, Terpeliharanya gedung kantor dan Terpeliharanya kendaraan dinas operasional
3.	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur (program penunjang)**	**Output** dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah Tersedianya Pakaian Dinas Lengkap beserta atribut, Tersedianya pakaian batik dan pakaian olahraga

4.	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (program penunjang)**	**Output** dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah Meningkatnya kinerja pegawai kecamatan Antapani dengan terlaksananya kegiatan pembinaan kinerja aparatur

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11

Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Sasaran Pertama "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik"

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**1.266.041.320,33**	**1.203.558.268,00**	**95,06**
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	195.983.088,33	163.593.984,00	83,47
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	9.807.100,00	9.807.100,00	100,00
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3.660.000,00	3.550.000,00	96,99
Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	27.115.000,00	25.043.500,00	92,36
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	99.800.741,00	98.833.910,00	99,03
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	94.350.113,00	91.792.470,00	97,29
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	24.437.544,00	24.306.544,00	99,46
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	230.828.235,00	219.763.700,00	95,21

	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	90.498.649,00	85.104.760,00	94,04
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	13.158.000,00	7.041.000,00	53,51
	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	136.233.650,00	134.552.100,00	98,77
	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	159.810.000,00	159.810.000,00	100,00
	KEGIATAN PENYEDIAAN Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	180.359.200,00	180.359.200,00	100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		**663.408.379,00**	**576.437.120,00**	**86,89**
	Kegiatan Pengadaan Mebeulair	79.449.150,00	76.447.250,00	96,22
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	524.900.000,00	442.191.600,00	84,24
	02.22 KEGIATAN PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR	59.059.229,00	57.798.270,00	97,86
Program peningkatan disiplin aparatur		**84.810.000,00**	**63.590.500,00**	**74,98**
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	84.810.000,00	63.590.500,00	74,98
Program Perencanaan Pembangunan Daerah		**18.620.000,00**	**18.331.375,00**	**98,45**
	Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja SKPD	18.620.000,00	18.331.375,00	98,45
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan		**5.774.852.937,67**	**5.413.807.425,00**	**93,75**

	Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	39.824.231,60	39.365.825,00	98,85
	Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan	687.074.200,00	667.576.465,00	97,16
	Kegiatan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	2.078.252.610,00	1.969.024.250,00	94,74
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	494.410.279,00	437.764.350,00	88,54
	Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan	2.052.510.228,00	1.888.066.440,00	91,99
	Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	63.388.544,07	62.050.700,00	97,89
	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	359.392.845,00	349.959.395,00	97,38

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan masyarakat disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor Pendukung Capaian Kinerja

a. SOP Pelayanan Telah dilaksanakan dengan baik oleh petugas pelayanan
b. Persyaratan dan prosedur Pelayanan Publik sudah dipublikasikan sehingga masyarakat dapat mengontrol setiap pelayanan yang diberikan
c. Sudah adanya Motto Pelayanan dan Ikrar Pelayanan Publik di Kecamatan Antapani
d. Anggaran yang memadai ditunjang oleh swadaya murni masyarakat
e. Peran aktif masyarakat Kecamatan Antapani

f. Program dan kegiatan yang terarah dari RPJMD sampai dengan PK Kecamatan Antapani

Faktor Penghambat Capaian Kinerja

- Penyerapan anggaran yang besar di akhir tahun anggaran, dikarenakan regulasi mengenai Honorarium Non PNS dan Honorarium Tenaga Ahli/ Narasumber yang terlambat dan belum maksimal sehingga peyerapan anggaran terhambat.
- Kurang Pahamnya warga masyarakat mengenai SOP Pelayanan dan persyaratan dalam pelayanan public
- Masih adanya masyarakat yang menggunakan jasa perantara dalam mengurus dokumen kependudukan dan pelayanan lainnya.
- Pengesahan APBD dan APBDP Kota Bandung yang lambat
- Kurangnya koordinasi SKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsan dengan Kecamatan Antapani
- Kurangnya kebutuhan jumlah SDM aparatur dalam pengorganisasian kegiatan dan pendokumentasian

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan masyarakat, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

Solusi/Rekomendasi perbaikan kinerja Triwulan / Tahun yang akan datang :

- Mengajukan tambahan SDM kepada BKD di Kecamatan Antapani
- Penguatan Regulasi dan atau aturan ditetapkan lebih cepat dan dan lebih jelas sehingga tidak menimbulkan multi tafsir SOP, Prosedur dan regulasi mengenai pelayanan public akan dipublikasikan lebih luas kepada masyarakat

- Koordinasi SKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsan dengan Kecamatan Antapani lebih ditingkatkan.

Sasaran 2

Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.12
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2014		%	Tahun 2015		%	Tahun 2016		%	Tahun 2017		%	Tahun 2018		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	75	85.08	113.44	77.50	88.47	114.15

Untuk sasaran 2 (dua) ini baru menjadi Indikator Kinerja Utama dan tercantum dalam Perjanjian Kinerja pada tahun 2017 dan 2018. Sedangkan pada tahun 2013-2016 Sasaran kedua adalah Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terdiri dari 6 (enam) indikator.

Pada bagian ini akan dipaparka analisa mengenai capaian kinerja tahun 2017-2018 dan selanjutnya capaian kinerja periode tahun 2013-2016.

Analisis pencapaian indikator kinerja Tingkat pemberdayaan Masyarakat

Capaian kinerja nyata indikator 1 "**Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**" adalah sebesar 88.47 dari target sebesar 77.50 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 114.15 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 **"Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan"** tahun ini meningkat 0.71 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 113.44

Tahun 2018 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator **1 "Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan"** tahun ini adalah sebesar 114.15 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Antapani maka capaian kinerjanya mencapai 114.15 %.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan" tahun ini baru di hitung rata rata dari 3 (tiga) kriteria, adapun untuk melihat perbandingan capaian kinerja dengan Kecamatan lainnya adalah sebagai berikut :

Grafik 3.4

Grafik Perbandingan % Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dengan Kecamatan Lainnya di Kota Bandung

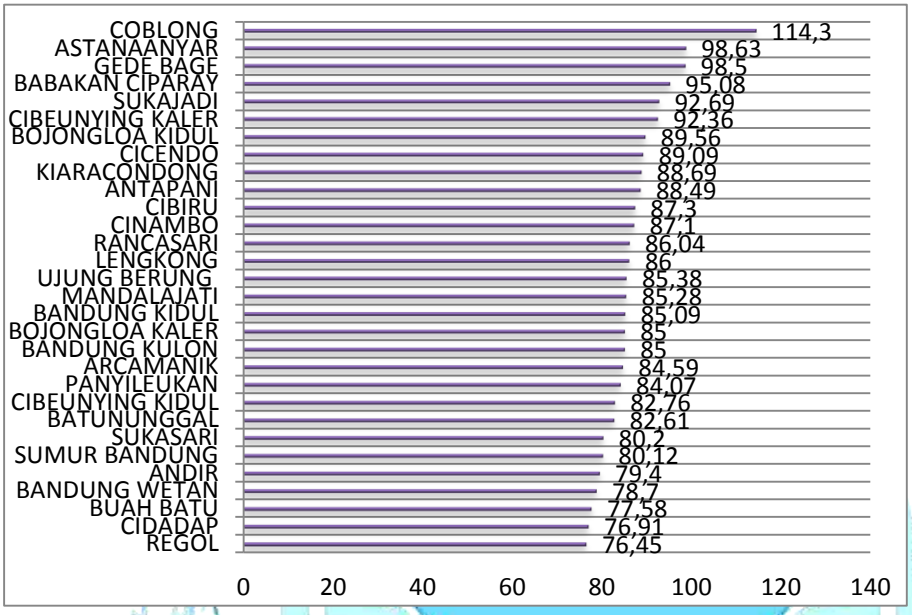

Sumber : http://lakip.bandung.go.id

Tahun 2018 adalah tahun terakhir pelaksanaan renstra, capaian kinerja indikator "Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan" tahun ini adalah sebesar 113.44 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Antapani maka capaian kinerjanya mencapai 109.08 %. Walaupun tahun ke 4 (empat) Renstra tetapi Indikator Kinerja ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya karena indikator Tingkat Pemberdayaan Masyarakat ini merupakan Indikator baru yang baru ditetapkan dalam Indikator Kinerja Kecamatan Antapani pada tahun 2017.

Indikator Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari 3 (tiga) Komponen pengukuran yaitu :

a. Kriteria RW Juara
b. LKK Aktif
c. Siskamling Aktif

Masing masing komponen memiliki kriteria yang harus dipenuhi yang selanjutnya akan di hitung persentase capaiannya. Kriteria tersebut telah disampaikan pada BAB II laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini. Adapun untuk menghitung capaian kinerja adalah sebagai berikut : **% Rata rata RW JUARA + LKK JUARA dan SISKAMLING AKTIF.** Adapun hasil perhitungan indikator % tingkat pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13

Tabulasi capaian indikator

Tingkat pemberdayaan masyarakat

No.	Sasaran	Indikator Sasaran (Outcome)/Indikator Capaian Program	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan	Formulasi Pengukuran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatknya pemberdayaan masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	75	%	**85,08 %**	**113,44 %**	**RW Juara = 76,66 %** **LKK Juara = 78,41 %** **Siskamling aktif = 100 %**	% Rata rata RW JUARA + LKK JUARA dan SISKAMLING AKTIF (Tabulasi Pengukuran Terlampir)

Untuk kriteria Persentase RW Juara dan perssentase LKK Juara dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karaena pada tahun 2014 s.d 2016 kriteria RW Juara dan LKK Aktif menjadi Indikator Sasaran Kinerja Strategis

Kecamatan Antapani pada tahun 2014 s.d 2016, adapun perbandinga capaian kinerjanya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.14
Tabulasi Pencapaian
Indikator RW Juara dan Lembaga Kemasyarakatan Aktif
selama 3 tahun Pelaksanaan di Kecamatan Antapani

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2014		%	Tahun 2015		%	Tahun 2016		%	Tahun 2017		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Prosentase RW Juara	%	32.26	40.33	125.02	51.61	77.96	151.06	77.10	77.27	100.22	75	76,66	100.22
2	Prosentase Lembaga kemasyarakatan Aktif	%	56.25	62.50	111.11	70	71.43	102.04	75	78.57	104.76	75	78,41	104.76

Analisis Capaian kriteria Prosentase RW Juara

Kriteria RW Juara apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya mengalami penurunan dimana pada tahun 2016 realisasi sebesar 77,27 % dan pada tahun 2017 menjadi 76,66 %. Hal itu apabila dianalisis berarti ada penurunan jumlah RW Juara sebanya 1 (satu) RW. Hasil analisis kami bahwa penurunan RW ini disebabkan pada kriteria pengolahan sampah berbasis rumah tangga, pada tahun 2017 ini Pengurus RW tersebut tidak melakukan pengolahan sampah seperti kriteria yang ditentukan sehingga tidak masuk dalam kriteria RW yang memiliki metode pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat.

Apabila dilihat dalam grafik pencapaian RW juara dari tahun 2014 sampai 2017 dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik 3.5

Grafik Peningkatan Prosentase RW Juara

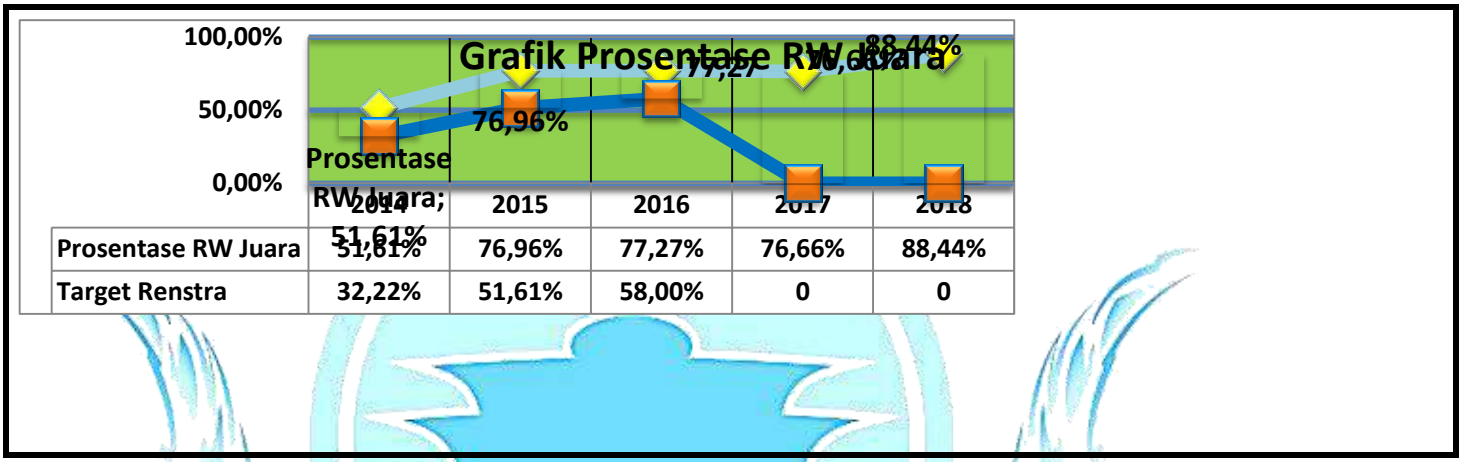

	2014	2015	2016	2017	2018
Prosentase RW Juara	51,61%	76,96%	77,27%	76,66%	88,44%
Target Renstra	32,22%	51,61%	58,00%	0	0

Dari Grafik diatas dapat dilihat pencapaian sebesar 88,44 % untuk capaian tahun 2018 dan 76,66% pada tahun 2017 menunjukan kemajuan yang signifikan dibandingkan dengan capaian pada tahun 2014 yaitu sebesar 51,61 %. Peningkatan yang cukup berarti ini menunjukan bahwa peran pemerintah Kecamatan dan Kelurahan cukup baik dalam mensosialisasikan Roadmap Walikota dan menjadikan katalisator dalam program dan kegiatan di tingkat RW sehingga dapat sesuai dengan Janji Walikota dan Roadmap Walikota Bandung.

Nilai kemajuan yang cukup besar ini didorong pula oleh Program Inovasi Pemberdayaan Pembangunan Kewilayahan, dimana program tersebut menunjang pembangunan di tingkat RW yang proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya langsung dilakukan oleh RT dan RW setempat serta berkoordinasi dengan pemerintah Kelurahan dan Kecamatan. Dengan adanya koordinasi inilah pembangunan di tingkat RW dan RT menjadi lebih terprogram dan terarah sesuai dengan Roadmap Bandung Juara serta disesuaikan juga dengan kriteria RW Juara. Dengan demikian kriteria RW Juara di Kecamatan Antapani meningkat dengan cepat, hal ini

membuktikan adanya sinergitas antara pemerintah Kelurahan dan Kecamatan dengan para ketua RW dan RT.

Solusi untuk pemenuhan kriteria ini memang diperlukan peningkatan partisipasi dari masyarakat, untuk itu pada tahun 2018 perlu adanya program dan kegiatan yang bersifat rangsangan, seperti pengadaan alat biodigester untuk RW agar di tiap RW ada pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Diharapkan dengan adanya program dan kegiatan yang bersifat rangsangan partisipasi dan peran aktif masyarakat akan lebih meningkat.

Untuk meningkatkan nilai indikator tersebut pada periode yang akan datang, kami akan bekerja sama dengan instasi terkait untuk mempermudah akselerasi pencapaian RW Juara, yaitu dengan melakukan sosialisasi dan menawarkan kepada RW untuk menerima bantuan program pengolahan sampah berbasis RW dari Pemerintah Kota Bandung.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Capaian kinerja nyata ***indikator Prosentase Lembaga Kemasyarakatan aktif*** Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria aktif adalah 11 Lembaga Kemasyrakatan dari 14 Lembaga Kemasyarakatan pada tahun 2018 yang ada di Kecamatan Antapani. Dan dari tabel tersebut dapat diketahui sebagian besar tidak aktifnya Lembaga Kemasyarakatan ini adalah pada kriteria keaktifan dalam mengikuti Lomba Kejuaraan Tingkat Kota Bandung yang Hanya diikuti oleh PKK saja. Sedangkan sisanya adalah karena tidak berjalannya program kerja yang telah ditetapkan sebelumnya, hal tersebut disebabkan karena program kerja yang belum bersinergi dengan program kerja pemerintah untuk tahun anggaran 2018.

Dana anggaran Rp. 100.000.000,00- dari Program Inovasi Pemberdayaan Pembangunan Kewilayahan yang dialokasaikan masing masing bagi LPM, PKK, dan Karang Taruna Kelurahan berhasil menjadi stimulan bagi lembaga kemasyarakatan untuk menyusun program kerja dan

melaksanakannya, serta menjadi perangsang bagi lembaga kemasyarakatan untuk berperan aktif dalam menunjang program pemerintah.

Pada periode tahun yang akan datang diharapkan Lembaga Kemasyarakatan seperti LPM, PKK dan Karang taruna dapat berperan lebih banyak sehubungan akan bergulirnya Program Inovasi Pemberdayaan dan Pembangunan (PIPPK), dimana untuk setiap Lembaga Kemasyarakatan tersebut akan dianggarkan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00- berupa program dan kegiatan yang di anggarkan dalam DPA masing masing kelurahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peran masing-masing lembaga. Sehingga diharapkan akan meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Antapani secara keseluruhan.

Solusi Untuk peingkatan pencapaian indikator lembaga kemsyarakatan aktif memang diperlukan peningkatan partisipasi aktif dari setiap kelompok masyarakat baik ditingkat Kecamatan maupun ditingkat Kelurahan, untuk itu pada tahun 2016 perlu adanya program dan kegiatan yang bersifat menunjang terhadap aktivitas setiap kelompok masyarakat, seperti penunjang pelaksanaan administrasi setiap lembaga masyarakat (PKK, Karang Taruna dan LPM), anggaran penunjang pelaksanaan kegiatan rutin lembaga masyarakat (PKK, Karang Taruna dan LPM) dan anggaran penunjang kegiatan lembaga masyarakat (PKK, Karang Taruna dan LPM) yang bersifat inovatif. Diharapkan dengan adanya program dan kegiatan yang menunjang aktivitas lembaga masyarakat (PKK, Karang Taruna dan LPM) lembaga masyarakat ini dapat berperan lebih aktif).

Dalam menindaklanjuti solusi tersebut diatas maka kami akan menerbitkan surat edaran Camat Antapani kepada para ketua LKK untuk mengingatkan kembali mengenai program kerja Pemerintah Kota Bandung agar terjadi keselarasan program kerja pemerintah kota dan LKK yang ada di Kecamatan.

Capaian kinerja nyata indikator ***kriteria Prosentase Lembaga Kemasyarakatan aktif*** adalah sebesar **78,57 %,** adapun jika dibandingkan capaian kinerja Kecamatan Antapani dengan Kecamatan lainnya di Kota Bandung dapat dilihat pada grafik berikut.

Hal tersebut membuktikan bahwa Kecamatan Antapani sudah cukup baik dalam melakukan pembinaan dan bermitra dengan Lembaga Kemasyarakatan seperti LPM, PKK dan Karang Taruna yang berada di wilayah kerja Kecamatan Antapani, tetapi masih harus tetap ditingkatkan karena masih jauh dari nilai sempurna.

Selanjutnya adalah Capaian ***kriteria % Siskamling Aktif*** persentase capaian kinerjanya adalah 100%. Kriteria % siskamling aktif ini memiliki 5 (lima) indikatror yaitu :

1. Adanya Pengurus
2. Adanya Kelompok Siskamling
3. Adanya Jadwal Siskamling
4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling
5. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)

Dengan capaian 98,39% berarti dari keseluruhan 62 RW di Kecamatan Antapani 61 Rw memiliki Siskamling aktif dan memenuhi kelima indikator yang ditetapkan oleh Kecamatan. Hal tersebut membuktikan bahwa ketaatan para ketua RW dalam upaya memenuhi dan mendukung program Pemerintah Kota Bandung.

Dari analisis sasaran indikator Meningkatknya pemberdayaan masyarakat seperti yang telah dipaparkan diatas adalah sebagai berikut ini.

Tahun 2018 adalah tahun terakhir renstra, capaian kinerja indikator "Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan" tahun ini adalah sebesar 113.44

%, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Antapani maka capaian kinerjanya mencapai 109.08 %. Walaupun tahun ke 5 (lima) Renstra tetapi Indikator Kinerja ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya karena indikator Tingkat Pemberdayaan Masyarakat ini merupakan Indikator baru yang baru ditetapkan dalam Indikator Kinerja Kecamatan Antapani pada tahun 2017.

Indikator Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari 3 (tiga) Komponen pengukuran yaitu :

- Kriteria RW Juara
- LKK Aktif
- Siskamling Aktif

Masing masing komponen memiliki kriteria yang harus dipenuhi yang selanjutnya akan di hitung persentase capaiannya. Kriteria tersebut telah disampaikan pada BAB II laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini. Adapun untuk menghitung capaian kinerja adalah sebagai berikut : **% Rata rata RW JUARA + LKK JUARA dan SISKAMLING AKTIF.** Adapun program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Antapani dalam memenuhi sasaran ini adalah Program Inovasi Pemberdayaan Pembangunan Kewilayahan. Program ini memiliki kegiatan dan output sebagai berikut :

Inovasi Pemberdayaan Lingkup RW	OUTPUT	Jumlah sub kegiatan inovatif/ pemberdayaan RW Se-Kecamatan
Inovasi Pemberdayaan Lingkup PKK	OUTPUT	Jumlah sub kegiatan inovatif/ pemberdayaan PKK Se-Kecamatan
Inovasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	OUTPUT	Jumlah sub kegiatan inovatif/ pemberdayaan Karang Taruna Se-Kecamatan
	OUTPUT	

Inovasi Pemberdayaan Lingkup LPM	Jumlah sub kegiatan inovatif/ pemberdayaan LPM Se-Kecamatan

Adapun outcome yang ingin dicapai dari program ini adalah Persentase Peran serta lembaga Kemasyarakatan terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat. Secara aplikasi di kewilayahan bentuk dari pemberdayaan ini adalah untuk memberdayakan LPM, RW, PKK dan Karang Taruna pada implementasi Tahun ke empat menjadi terobosan dalam percepatan pencapaian target pembangunan dengan semangat desentralisasi, dimana kewilayahan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat mendapat porsi yang sangat besar dari sisi kewenangan dan anggaran. Janji yang diwujudkan dalam Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) menjadi inovasi pembangunan Kota Bandung di tingkat kewilayahan, seperti yang tertuang dalam RPJMD Kota Bandung. Mengenai target tingkat pemberdayaan masyarakat **Tinggi** dalam RPJMD, capaian kinerja kecamatan Antapani dalam pemberdayaan masyarakat termasuk dalam kategori tinggi dimana capaian kinerjanya mencapai **85,08 %.** Capaian ini diraih dengan rincian sebagai berikut :

- **RW Juara = 88,44 %**
- **LKK Juara = 78,57 %**
- **Siskamling aktif = 98,39 %**

Maka diperoleh capaian rata rata **88,47 %.** Capaian 88,47 % jika dibandingkan dengan target yang ditentukan pada saat perencanaan maka capaian kinerjanya mencapai **114,15% atau melebihi target yang ditentukan dan** masuk dalam kategori **Sangat tinggi** dan telah memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018, adapun kategori tinggi, rendah ataupun sedang dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.15

Tabel Tabulasi Kategori Kategori Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	**Sangat tinggi**	**> 90**
2	Tinggi	75.00 – 89.99
3	Sedang	65.00 – 74.99
4	Kurang	50.00 – 64.99
5	Sangat Kurang	0 – 49.99

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Meningkatknya pemberdayaan masyarakat disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

1. Anggaran yang tidak memadai, namun ditunjang oleh swadaya murni masyarakat
2. Peran aktif masyarakat Kecamatan Antapani

Faktor Penghambat

1. Peraturan yang mengatur pelaksanaan teknis berubah-rubah
2. Kurangnya koordinasi SKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsan dengan Kecamatan Antapani
3. Kurangnya kebutuhan jumlah SDM aparatur dalam pengorganisasian kegiatan dan pendokumentasian
4. Komponen dalam aplikasi e-budgeting belum mengakomodasi semua kebutuhan Masyarakat dan LKK.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Meningkatknya pemberdayaan masyarakat, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

Solusi/Rekomendasi perbaikan kinerja Triwulan / Tahun yang akan datang

- ✓ Mengajukan tambahan SDM kepada BKPP di Kecamatan Antapani
- ✓ Menerbitkan Surat Edaran Camat Antapani mengenai anjuran untuk para RW dan Ketua LKK agar menyesuaikan dengan program prioritas pemerintah Kota Bandung
- ✓ Koordinasi SKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsan dengan Kecamatan Antapani lebih ditingkatkan.

Program dan Kegiatan Capaian Kinerja Sasaran 2

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat didukung oleh Program :

No.	PROGRAM	URAIAN/ PENJELASAN
(1)	(2)	(3)
1.	**Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan**	▪ Mewujudkan **masyarakat yang madani** (*civil society*) ▪ Meningkatkan **fungsi, kemampuan dan peranan Lembaga Kemasyarakatan di tingkat Kewilyahan** untuk menampung, menyalurkan aspirasi, mengkoordinasikan dan memberdayakan masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan serta mampu mengelola proses pembangunan secara inovatif dan mandiri. ▪ Meningkatkan **kemampuan sumber daya manusia** melalui pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat sebagai upaya menumbuhkan inovasi, kreativitas, motivasi dan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. ▪ Meningkatkan **Peran Serta dan partisipasi masyarakat** dalam pembangunan di kewilayahan; ▪ **Mengakselerasi** pelaksanaan pembangunan melalui **semangat kolaborasi dan desentralisasi**

Penyerapan Anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan pada **Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan** dengan realisasi penyerapan pada akhir tahun sebesar **Rp. 7.306.673.308,- dari Anggaran sebesar Rp. 7.411.062.045 dengan prosentase sebesar 98,59%. Adapun rincian penyerapan anggaran sasaran ini dapat dilihat sebagai berikut:**

Tabel 3.16

Program Dan Kegiatan Yang Menunjang Capaian Sasaran Meningkatknya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Antapani

No.	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Output	Dampak (baik/ kurang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	**Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan**	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW	6.212.322.131	6.137.757.934	Jumlah sub kegiatan inovatif/ pemberdayaan RW Se-Kecamatan	Baik
		Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK	398.314.874	388.170.000	Jumlah sub kegiatan inovatif/ pemberdayaan PKK Se-Kecamatan	Baik
		Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	397.728.103	383.992.595	Jumlah sub kegiatan inovatif/ pemberdayaan Karang Taruna Se-Kecamatan	Baik
		Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM	402.696.937	396.752.779	Jumlah sub kegiatan inovatif/ pemberdayaan LPM Se-Kecamatan	Baik

Analisis Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik

(Sebelum Reviu Renstra tahun 2013-2016)

Sedangkan untuk capaian sasaran 1 (satu) pada periode tahun 2013-2016 terdapat 3 indikator sasaran yang pada tahun 2017-2018 indikator tersebut direviu menjadi 1 (satu) indikator saja. Adapun pencapaian dari sasaran 1(satu) periode tahun 2013-2016 dapat diuraikan berikut ini.

Tabel 3.17
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya kualitas pelayanan publik (2013-2016)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2014		%	Tahun 2015		%	Tahun 2016		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	75	80.02	100.02	82	82.02	100.02	82.28	82.29	100.01
2	Prosentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI	Angka	820	900	109.76	905	906	100.11	908	955	105.18

Penjelasan mengenai table diatas (sasaran meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 2013-2016) dapat dilihat pada paparan dibawah ini :

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan public periode tahun 2014-2016) dapat dilihat dari 3 (tiga) indikator : Indeks Pelayanan/Indeks

Kepuasan Masyarakat, Prosentase keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti, Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI.

Sasaran Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan. dapat dilihat dari sebanyak 6 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Prosentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu" adalah sebesar - dari target sebesar 93.96 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 0.00 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Analisis Capaian Indikator Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat

Capaian kinerja nyata indikator ***Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat*** adalah sebesar 82,29 dari target sebesar 82,28 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,01% atau melebihi/ melampaui target yang diperjanjikan, adapun perhitungan menggunakan pedoman survey SK Menpan No 25 tahun 2004.

Tahun 2016 adalah tahun ketiga renstra, capaian tahun 2016 sebesar 82,29 bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan yaitu sebesar 82,9 maka capaian kinerjanya mencapai 99,26%.

Data penunjang capaian kinerja indikator Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari sekretariat Kecamatan Antapani dan Kepala Seksi Pelayanan. Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat secara mandiri oleh Tim yang dibentuk oleh Surat Keputusan Camat Antapani yang dilakukan tiap triwulan pada tahun 2016. Adapun hasil perhitungan dari 14 Indikator Pelyanan

Capaian Kinerja nilai IKM pada tahun 2016 telah melampaui target minimal yang menjadi standar Kota Bandung yang terdapat dalam RPJMD Kota Bandung yaitu, indikator Persentase SKPD dengan nilai IKM "Baik" diukur berdasarkan jumlah SKPD yang melakukan survey kepuasan masyarakat dengan hasil di atas 75,00. Capaian yang diperoleh oleh Kecamatan Antapani sudah melampaui target minimal yang menjadi ukuran IKM Kota Bandung.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Prosentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti" adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Pada tahun 2016 adalah tahun ke 3 renstra, capaian kinerja indikator 2 "Prosentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Antapani maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %.

Capaian kinerja nyata indikator Prosentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti adalah sebesar 27 Keluhan dan ditindaklanjuti 27 keluhan yang maasuk dalam Aplikasi LAPOR ataupun Sosial media Resmi Kecamatan Antapani dengan demikian persentase capaian kinerjanya adalah 100,00% atau sesuai dengan target yang diperjanjikan. Tahun 2016 adalah tahun Ketiga pelaksanaan Renstra, capaian tahun 2016 sebesar 100% bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 100%. Indikator ini merupakan indikator hasil reviu IKU dan pengukurann hanya bersumber dari data Aplikasi LAPOR dan Sarana Pengaduan lainnya seperti kotak saran, sosial media dan buku laporan

Data penunjang capaian kinerja pada tahun 2016 memperhitungkan pengaduan yang terpublikasi dari **www.LAPOR.go.id, twiter, Facebook dan kotak saran** didapat bahwa pengaduan Data penunjang capaian kinerja indikator Prosentase Keluhan/Pengaduan Pelayanan Administratif Yang ditindaklanjuti pada tahun 2016 sebnesar 100%. Kinerja nyata persentase keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti pada triwulan IV adalah 100 %, pada triwulan IV jumlah pengaduan yang ditujukan ke Kecamatan Antapani sejumlah 19 pengaduan melalui LAPOR dan *account twitter* sebanyak 5 (Lima) pengaduan.

Adapun total pengaduan melalui aplikasi LAPOR Pada tahun 2016 sebanyak 27 Pengaduan dan semuanya telah ditindaklanjuti dan twiter sebanyak 10 Pengaduan semuanya telah ditindaklanjuti. Adapun rekapitulasi Keluhaan dapat dilihat sebagaimana terlampir berikut :

Tabel 3.18

Rekapitulasi Pengaduan Kecamatan Antapani Tahun 2016

NO	BIDANG	MEDIA PENGADUAN				
		LANGSUNG	FACEBOOK	TWITTER	LAPOR	SMS
1	Pemerintahan	0	0	1	5	0
2	Trantib	0	0	1	5	0
3	Ekbang LH	0	0	3	7	0
4	Dikmas	0	0	0	1	0
5	Pelayanan	0	0	6	9	0
	Jumlah	**0**	**0**	**10**	**27**	**0**

Adapun bukti otentik yang terpublikasi dalam aplikasi LAPOR dapat dilihat pada gambar berikut ini

Gambar 3.1

Gambar pengaduan masyarakat dari aplikasi LAPOR

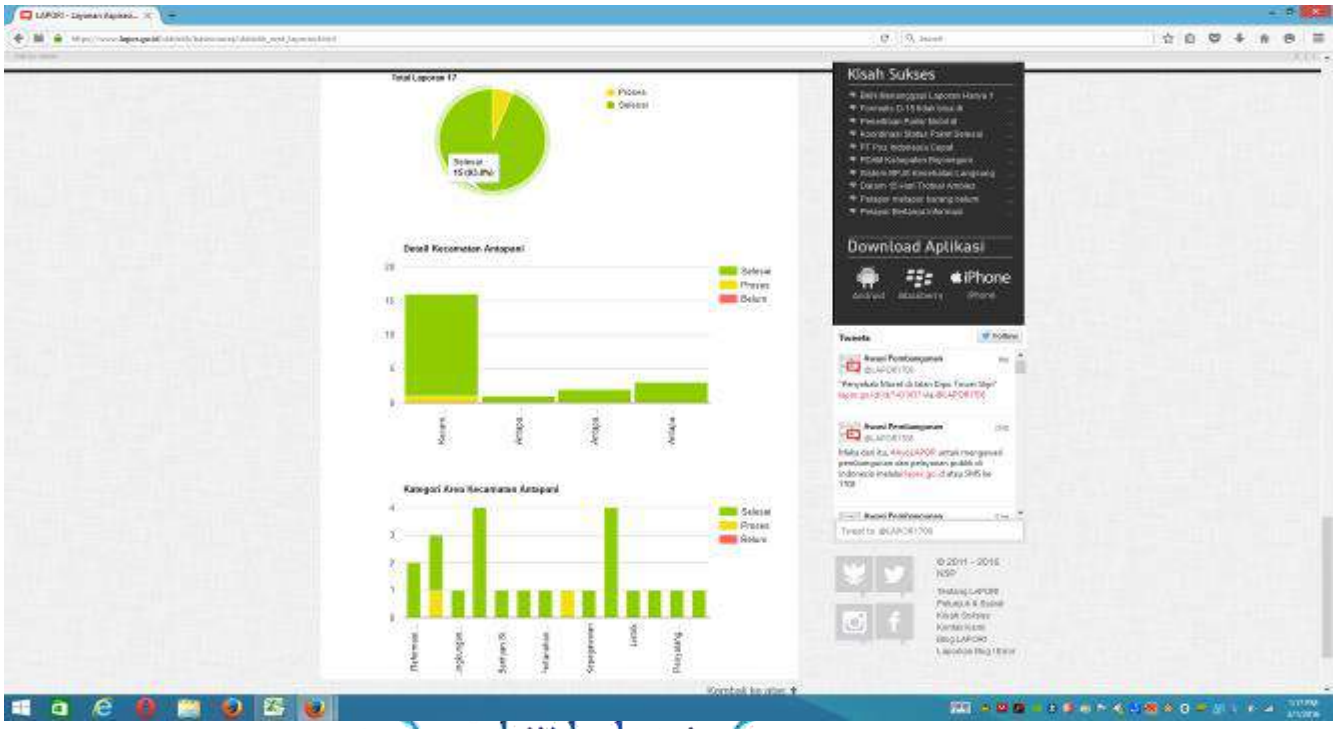

Sumber: https://www.lapor.go.id/statistik/baseonarea/statistik_area_laporan.html

Dari gambar diatas untuk periode keseluruhan pada tahun 2016 Prosentase Keluhan/Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti yang diperoleh dari LAPOR.go.id selama tahun 2016 dari 27 keluhan telah dijawab dan ditindaklanjuti sebanyak 27 Keluhan/pengaduan pelayanan

administratif yang ditindaklanjuti adalah sebesar 100,00% dengan demikian capaian kinerja mencapai 100%.

Capaian kinerja nyata indikator 3 "Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI" adalah sebesar 955 dari target sebesar 908 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 105.18 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 3 "Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI" tahun ini meningkat 5.07 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100.11

Tahun 2016 adalah tahun ke 3 renstra, capaian kinerja indikator 3 "Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI" tahun ini adalah sebesar 105.18 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Antapani maka capaian kinerjanya mencapai 104.37 %.

Capaian kinerja nyata indikator Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI adalah sebesar 955 dari target sebesar 908 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 105,18% atau melebihi/ melampaui target yang diperjanjikan. Tahun 2016 adalah tahun ketiga renstra, capaian tahun 2016 sebesar 955 bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan yang sebesar 915 maka capaian kinerjanya mencapai 104,37 %.

- Kinerja Nyata Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI diperoleh rata-rata nilai *self assesment* Kecamatan Antapani dan 4 (empat) Kelurahan dengan hasil sebagai berikut :

Grafik 3.5

Grafik nilai standar kepatuhan pelayanan public (s.d tahun 2016)

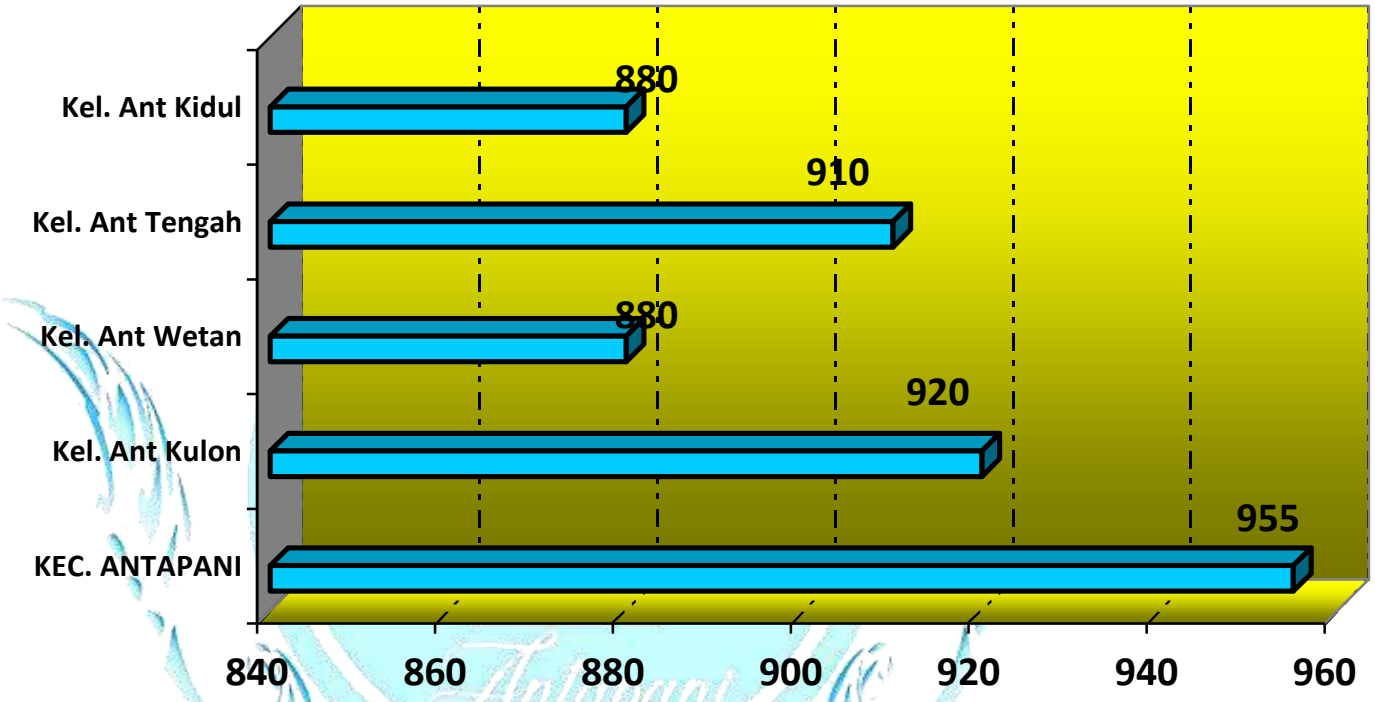

Kecamatan Antapani 955

- Kelurahan Antapani Kulon 920
- Kelurahan Antapani Wetan 880
- Kelurahan Antapani Kidul 910
- Kelurahan Antapani Kidul 880

***) Maka diperoleh rata-rata nilai 909**

Penilaian ini dilakukan pada triwulan IV untuk memproyeksikan kekurangan dan kendala yang bisa ditanggulangi sehingga pada tahun mendatang didapat nilai yang optimal, walaupun pada pengukuran triwulan IV ini sudah dapat mencapai target akhir tahun sesuai perjanjian kinerja tahun 2016.

Analisis Sasaran 2 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan Antapani

(Sebelum Reviu Renstra tahun 2013-2016)

Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan Antapani

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2016		%	Tahun 2018		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Prosentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	%	93,96	n/a	**n/a**	93,91		
2.	Prosentase waktu pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu	%	100	100	**100,00%**	100		100,00%
3.	Prosentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik	%	75	75	**100%**	100		75,00%
4.	Prosentase RW Juara	%	77,10	77,27	**100,22%**	77,96		99,11%
5.	Prosentase Lembaga kemasyarakatan Aktif	%	75	78,57	**104,76%**	71,43		110,00%
6.	Rasio Anggota Linmas	Rasio	1:1.09	1:1.10	**100,92%**	`1:1,1		100%
Rata-rata Capaian Indikator					**101,18 %**	-	-	-

Dari tabel diatas dapat diketahui rata rata capaian sasaran 2 adalah sebesar 101,18 %, yang artinya telah melebihi target yang direncanakan . Sedangkan untuk melihat perkembangan pencapaian Sasaran ini dari tahun ke tahun pelaksanaan RENSTRA dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.20
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan selama 3 tahun Pelaksanaan di Kecamatan Antapani

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2014		%	Tahun 2015		%	Tahun 2016		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Prosentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	%	85	91.78	107.98	91.80	93.91	102.29	93.96	-	0
2	Prosentase waktu pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Prosentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik	%	50	50	100	75	75	100	75	75	100
4	Prosentase RW Juara	%	32.26	40.33	125.02	51.61	77.96	151.06	77.10	77.27	100.22
5	Prosentase Lembaga kemasyarakatan Aktif	%	56.25	62.50	111.11	70	71.43	102.04	75	78.57	104.76

6	Rasio Anggota Linmas	**Ratio**	**1:0.5**	**0.94:1**	**188**	**1:01**	**1:1.09**	**109.25**	**1:1.10**	**1:1.10**	**100**

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Prosentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu" tahun ini menurun 102.29 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 102.29

kependudukan tepat waktu adalah sebesar **5.843** pelayanan KTP Tepat waktu dari **6.204** Pelayanan KTP yang ditangani selama bulan Januari 2016 sampai dengan Agustus 2016 dan **4.330** Pelayanan Permohonan KK tepat waktu dari total **4.613** Jumlah Permohonan KK yang dilayani selama periode Januari 2016 sampai dengan Agustus 2016, atau dengan kata lain Kinerja pelayanan KK dan KTP Tepat Waktu di Kecamatan Antapani sebesar 93,91% dari target sebesar 91,80 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016, adapun persentase capaian kinerjanya pada tahun 2016 ini tidak dapat diukur karena pada bulan Agustus Chip e-KTP telah Habis dan tidak dapat didistribusikan ke Kecamatan kecamatan se kota Bandung, bahkan chip e KTP ini merata secara nasional tidak dapat didistribusikan oleh Kemendagri.

Karena data capaian akhir tahun tidak dapat diperoleh untuk mengukur kinerja indikator sasaran ketepatan waktu pelayanan administrasi kependudukan dikarenakan Chip e KTP yang tidak tersedia sehingga perhitungan kinerja pada akhir tahun tidak dapat di tabulasikan. Adapun rekapitulasi pelayan administrasi kependudukan pada bulan Januari 2016 s.d Agustus 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.21

Data Pelayanan Administrasi Kependudukan

Tepat Waktu

KARTU KELUARGA						KARTU TANDA PENDUDUK			
NO	BULAN	JUMLAH TEPAT WAKTU	JUMLAH TIDAK TEPAT WAKTU	JML PELAYANAN KK	%	JUMLAH TEPAT WAKTU	JUMLAH TIDAK TEPAT WAKTU	JML PELAYAN KTP	%
1	JANUARI	600	55	655	91,60%	800	80	880	90,91%
2	FEBRUARI	522	33	555	94,05%	855	53	908	94,16%
3	MARET	633	37	670	94,48%	942	52	994	94,77%
4	APRIL	500	50	550	90,91%	497	42	539	92,21%
5	MEI	559	23	582	96,05%	865	33	898	96,33%
6	JUNI	686	36	722	95,01%	619	36	655	94,50%
7	JULI	542	31	573	94,59%	590	36	626	94,25%
8	AGUSTUS	288	18	306	94,12%	675	29	704	95,88%
JUMLAH		**4330**	**283**	**4613**	**93,85%**	**5843**	**361**	**6204**	**94,13%**

Capaian Kinerja indikator Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu s.d Bulan Agustus 2016 = (93,85% + 94,13%) / 2 = 93,99%

Tahun 2016 adalah tahun ke 3 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Prosentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu" tahun ini adalah sebesar 0.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Antapani maka capaian kinerjanya mencapai 0.00 %.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Prosentase waktu pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu" adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016

sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Tahun 2016 adalah tahun ke 3 renstra, capaian kinerja indikator 2 "Prosentase waktu pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Antapani maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %. Berikut gambaran mengenai pelayanan administrasi umum lainnya di kecamatan Antapani 2016

Grafik 3.6

Grafik persentase pelayanan administrasi umum lainnya di Kecamatan Antapani

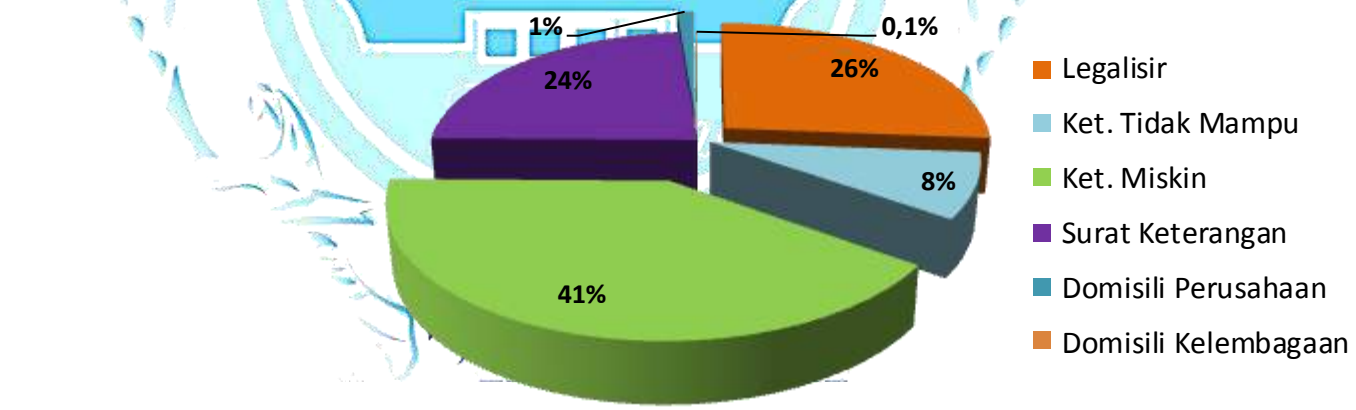

Capaian kinerja nyata indikator 3 "Prosentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik" adalah sebesar 75 dari target sebesar 75 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Tahun 2016 adalah tahun ke 3 renstra, capaian kinerja indikator 3 "Prosentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik" tahun ini

adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Antapani maka capaian kinerjanya mencapai 75.00 %.

Tabel 3.22

Data Prosentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik tahun 2016

NO	KRITERIA	KELURAHAN			
		Antapani Kulon	Antapani Wetan	Antapani tengah	Antapani Kidul
1	Menyampaikan minimal 75% dari seluruh laporan rutin tepat waktu	V	v	v	v
2	Menuntaskan dan atau turut serta membantu penuntasan minimal 75% dari keluhan masyarakat dalam pelayanan administrative	V	-	v	v
3	Rasio Sumur Resapan min 1 : 1 baik	V	v	v	v
4	Rasio Lubang Biopori min 1:1 baik (per KK)	V	-	v	v
5	Kerb telah dicat warna hitam dan putih tidak pudar pada triwulan ke 3 setiap tahun	V	v	v	v
6	Terpelihara / tidak ada rumput liar / gulma yang mencolok setiap triwulan	V	v	v	v
	JUMLAH KELURAHAN YANG MEMENUHI KRITERIA BAIK	6 (baik)	3 (belum)	6 (baik)	6 (baik)

Capaian kinerja nyata indikator 4 "Prosentase RW Juara" adalah sebesar 77.27 dari target sebesar 77.10 yang direncanakan dalam

Perjanjian Kinerja Tahun 2016 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.22 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 4 "Prosentase RW Juara" tahun ini menurun 50.84 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 151.06

Tahun 2016 adalah tahun ke 3 renstra, capaian kinerja indikator 4 "Prosentase RW Juara" tahun ini adalah sebesar 100.22 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Antapani maka capaian kinerjanya mencapai 87.71 %.

Capaian kinerja nyata indikator 5 "Prosentase Lembaga kemasyarakatan Aktif" adalah sebesar 78.57 dari target sebesar 75 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 104.76 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 5 "Prosentase Lembaga kemasyarakatan Aktif" tahun ini meningkat 2.72 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 102.04

Tahun 2016 adalah tahun ke 3 renstra, capaian kinerja indikator 5 "Prosentase Lembaga kemasyarakatan Aktif" tahun ini adalah sebesar 104.76 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Antapani maka capaian kinerjanya mencapai 89.79 %.

Capaian kinerja nyata indikator 6 "Rasio Anggota Linmas" adalah sebesar 1:1.10 dari target sebesar 1:1.10 yang direncanakan dalam

Perjanjian Kinerja Tahun 2016 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 6 "Rasio Anggota Linmas" tahun 2016 menurun 9.25 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 109.25

Tahun 2016 adalah tahun ke 3 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Rasio Anggota Linmas" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Antapani maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %.

Capaian kinerja indikator ***Rasio Anggota Linmas*** adalah sebesar 1 : 1,1 bila dibandingkan dengan Kecamatan lainya di Kota Bandung dapat dilihat sebagai berikut.

Data penunjang capaian kinerja diperoleh dari Kasi Trantib terlampir pada tabel berikut ini

Tabel 3.23

Rasio Anggota LINMAS di Kecamatan Antapani Tahun 2016

NO	KRITERIA	KELURAHAN				JUMLAH
		Antapani Kulon	Antapani wetan	Antapani Tengah	Antapani Kidul	
1	Jumlah LINMAS	36	113	107	110	368
2	Jumlah RT	41	69	113	112	335
JUMLAH RT : RASIO LINMAS						**1,1 : 1**

Sumber : Kasi Trantib Kecamatan Antapani

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa rasio RT : Anggota Linmas di Kecamatan Antapani sudah melebihi rasio ideal 1 : 1, yang mana rasio 1:1 tersebut merupakan sebuah kondisi minimal yang ideal dalam melakukan pengamanan lingkungan. Dari data diatas terlihat untuk memenuhi kondisi ideal tersebut diperlukan penambahan anggota linmas yang relatif sedikit, sedangkan Rasio yang telah dicapai Kecamatan Antapani adalah 1 : 1,1 dengan demikian capaian kinerjanya mencapai 100% terhadap target yang telah diperjanjikan dalam penetapan kinerja tahun 2016 yaitu sebesar 1:1.

Akan tetapi menjadi perhatian selanjutnya adalah msih kurangnya kondisi ideal rasio linmas ini di Kelurahan Antapani Kulon, dimana hanya ada 36 anggota Linmas dari 41 RT yang ada di Kelurahan Antapani Kulon atau dengan kata lain Rasio nya sebesar 0,88 : 1. Kondisi tersebut mengakibatkan kurangnya anggota Linmas yang berada dilapangan. Selain itu kondisi lain yang menghambat adalah karena masih kurangnya swadaya masyarakat di tingkat RT ataupun RW, karena selama ini untuk honor ataupun gaji Linmas di RW dan RT dibayarkan melaui Kas yang bersumber dari iuran warga yang dikelola oleh Ketua RT dan RW setempat.

Rasio Linmas terbesar di Kecamatan Antapani ada di Kelurahan Antapani Wetan dimana terdapat 113 Anggota Linmas dari 69 RT, dengan demikian rasionya adalah 1,64 : 1. Adapun untuk rasio Linmas di Kecamatan Antapani dapat dilihat pada Grafik berikut ini

Grafik 3.7

Grafik Perbandingan indikator indikator Rasio Anggota Linmas di Kecamatan Antapani

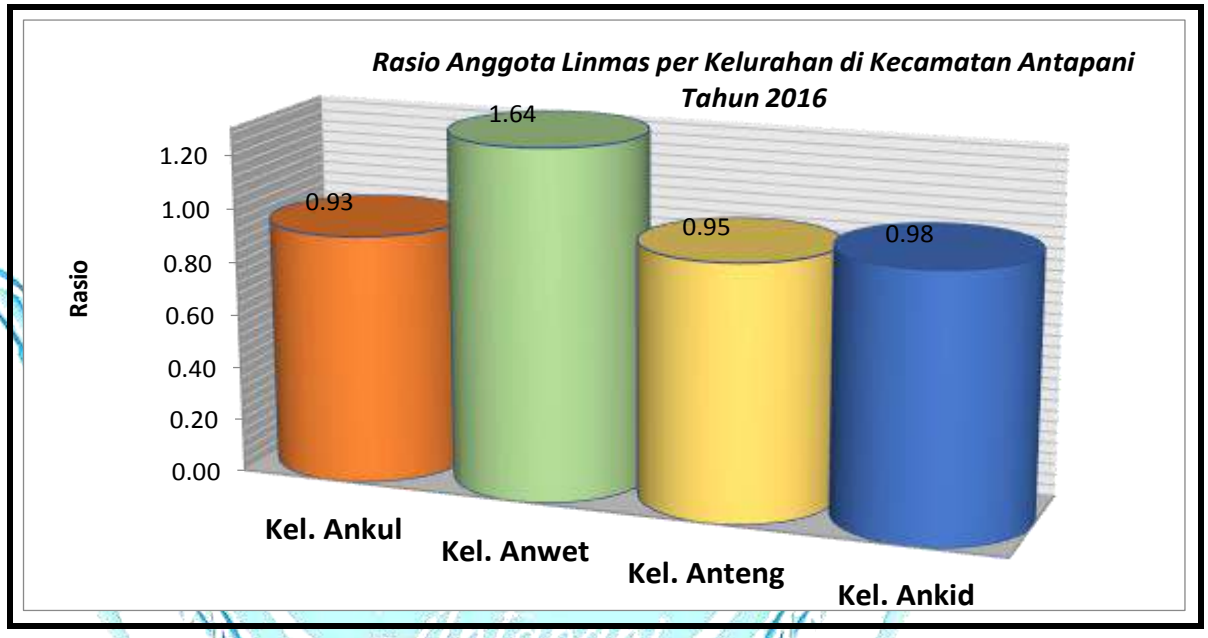

Sumber : Kasi Tramtib Kecamatan Antapani

Untuk Mengetahui fluktuasi peningkatan atau penurunan capaian kinerja indikator ini dapat dilihat pada grafik berikut ini yang menggambarkan capaian kinerja tiap tahunnya.

Grafik 3.8

Grafik fluktuasi perbandingan capaian tahun tahun sebelumnya

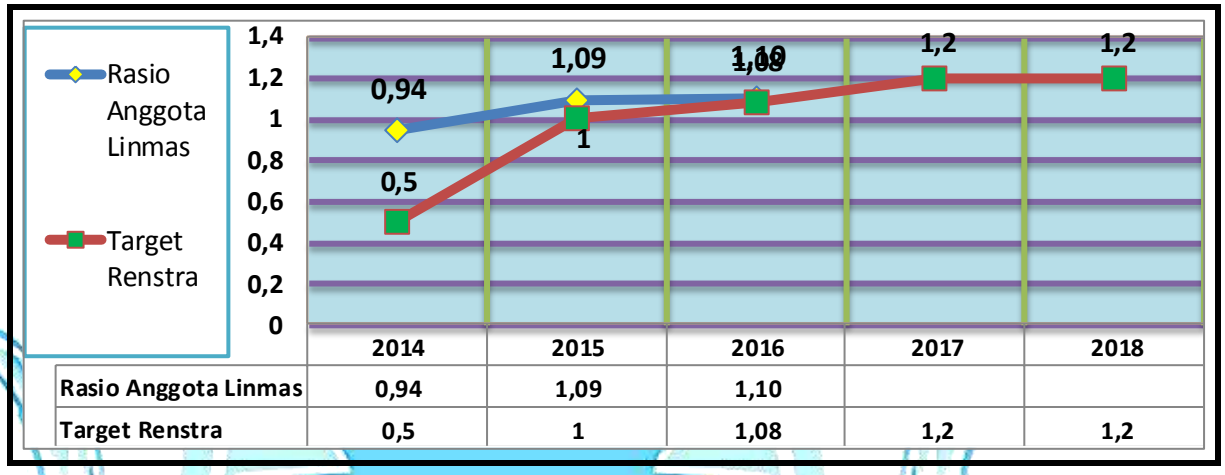

	2014	2015	2016	2017	2018
Rasio Anggota Linmas	0,94	1,09	1,10		
Target Renstra	0,5	1	1,08	1,2	1,2

Bila dibandingkan dengan target renstra pada tahun 2018 maka capaian kinerja sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.24

Pencapaian Indikator Sasaran Meningkatnya Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan Antapani Tahun 2016 dibandingkan Target Akhir Renstra Kecamatan Antapani Kota Bandung Tahun 2013-2018

NO	IKU/ INDIKATOR KINERJA	SATU-AN	TAR-GET	REALI-SASI 2016	CAPAI-AN (%)	REALI-SASI -2015	RENSTRA (2018)	
							TARGET	CAPAI-AN (%)
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1.	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	%	93,96	n/a	**n/a**	91,78	93,91	
2.	Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu	%	100	100	**100,00%**	100	100	100,00%

3.	Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik	%	75	75	**100%**	50	100	75,00%
4.	Persentase RW Juara	%	77,10	77,27	**100,22%**	40,33	77,96	99,11%
5.	Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif	%	75	78,57	**104,76%**	62,5	71,43	110,00%
6.	Rasio Anggota Linmas	Rasio	1:1.09	1:1.10	**100,92%**	0,94:1	`1:1,1	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2016 dibandingkan dengan rencana akhir Renstra pada tahun 2018 menunjukkan capaian kinerja rata-rata **101,18 %** yang berarti telah mencapai/ melebihi target kinerja sesuai target akhir Renstra. Dengan demikian perlu dilakukan reviu kembali terhadap target tahun yang akan datang dan target Renstra Kecamatan karena beberapa indikator kinerja telah dicapai pada tahun 2016, oleh karena itu target tahun 2017 dan target pada akhir Renstra peru disesuaikan kembali.

Program dan Kegiatan Capaian Kinerja Sasaran 2

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan Panyileukan didukung oleh Program :

No.	PROGRAM	URAIAN/ PENJELASAN
(1)	(2)	(3)
1.	**Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan**	**Output** program beserta kegiatan didalamnya antara lain Simpul Space Kecamatan, 30 kampung Kreatif Wisata, *Creative District Project,* (termasuk pembinaan KUKM, Profil Potensi Ekonomi), Rumah Sehat, Satu Taman Satu Komunitas, Satu Kampung Satu Taman, Forum Jaga Budaya di Kelurahan, Forum RW Juara, Forum Karang Taruna Juara, Forum LPM Juara, Kampung Berkebun, Bedah Rumah Warga Miskin (termasuk Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan, Profil masalah Sosial), Rumah Sehat, Kampung Berkebun, Bike Sharing, Jum'at Bersepeda, Gerakan *Zero Waste Home*, Bank Sampah, Motor Sampah Kelurahan, Supermarket Sampah, Tempat Sampah RW/ Jalan Utama, Sejuta Biopori/ Sumur Resapan, Mesin Pencacah Sampah, Pengajuan Mobil Pembersih, Bendungan Sampah, *Septic Tank Communal*, Hemat Air dan

		Daur Ulang, *River Green Wall*, Gerakan Atap Hijau, Gerakan Pagar Hijau, Gerakan Satu Rumah Satu Pohon, Gerakan Bandung *Green N Clean*, Gerakan Bandung Bersih, Jalan Caang Baranang, Media Kampanye Bandung Bebas, Banjir,Perkerasan paving Kotak, Gerakan Membangun Tanpa Menggusur di Kampung Kumuh, Kebinamargaan, Pasukan Gorong Gorong (termasuk MUSRENBANG), Penanganan Pasar Tumpah, Satpol PP Kecamatan, Forum PKL, Media Brosur Tertib PKL (termasuk operasional SATPOL PP Kecamatan, Pembinaan LINMAS, SATWANKAR) SATGASUS PKL, Balai RW/ Markas Karang Taruna, Safari Aspirasi Walikota Dengan Warga Level RW Setiap RW Setiap Minggu, Honor RW RT (termasuk pembinaan RW RT), (termasuk operasional Pelayanan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan)

Analisis Sasaran 3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi.

(Sebelum Reviu Renstra tahun 2013-2016)

Secara garis besar pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.25

Analisis Pencapaian Sasaran 3

Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi

NO	IKU/ INDIKATOR KINERJA	SATU-AN	TAR-GET	REALI-SASI	CAPAI-AN (%)	REALI-SASI -2014	RENSTRA (2018)	
							TARGET	CAPAI-AN (%)
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1.	Nilai AKIP Kecamatan	Nilai	63,10	63,53	**100,68%**	62,88	71	89,48%
2.	Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti	%	100	100	**100,00%**	100	100	100,00%
Rata-rata Capaian Indikator					**100,34**			**94,28**

Untuk mengukur peningkatan dan pencapaian kinerja tiap tahun dari tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.26

Analisis Pencapaian Sasaran 3

Selama 3 tahun Renstra

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2014		%	Tahun 2015		%	Tahun 2016		%
			Target	Reali sasi		Target	Reali sasi		Target	Reali sasi	
1	Nilai Evaluasi AKIP	Angka	52	53.33	102.56	60	62.88	104.8	63.10	63,53	100.68
2	Prosentase temuan BPK / Inspektorat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100

	yang ditindaklanjuti										

Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi dapat dilihat dari 2 (dua) indikator: Nilai evaluasi AKIP dan Prosentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti. Berikut ini adalah analisis pencapaian kinerja dua indikator tersebut.

Capaian kinerja nyata indikator ***Nilai Evaluasi AKIP*** adalah sebesar **63,53** dari target sebesar **63,10** yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah **100,68%** atau melebihi/ melampaui target yang diperjanjikan. LKIP Tahun 2015 (penilaian tahun 2016) mengalami peningkatan dalam segi Nilai dibandingkan LKIP tahun 2014, dimana LKIP tahun 2015 Kecamatan Antapani memiliki Nilai Mutu **53,33**. Terdapat peningkatan pada LKIP Tahun 2015 yaitu mendapatkan nilai mutu **62,88** tetapi masih dalam kategori mutu nilai **CC**. Adanya peningkatan dari nilai mutu LKIP tahun sebelumnya adalah karena adanya perbaikan dari sisi evaluasi kinerja tahun berjalan. Rendahnya nilai evaluasi AKIP ini disebabkan nilai perencanaan yang relatif kecil, yang artinya kurang sinkronnya perencanaan kinerja khususnya pada RENSTRA 2008-2013 dengan program kerja yang dilaksanakan pada tahun berjalan.

Data penunjang capaian kinerja diperoleh dari Kesekretariatan Kecamatan Antapani berdasarkan laporan hasil evaluasi terbatas atas Lakip Kecamatan Antapani tahun anggaran 2015 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Bandung sebagaimana tabel dibawah ini :

Grafik 3.9
Perbandingan Capaian Nilai AKIP tahun 2016 dan tahun tahun sebelumnya

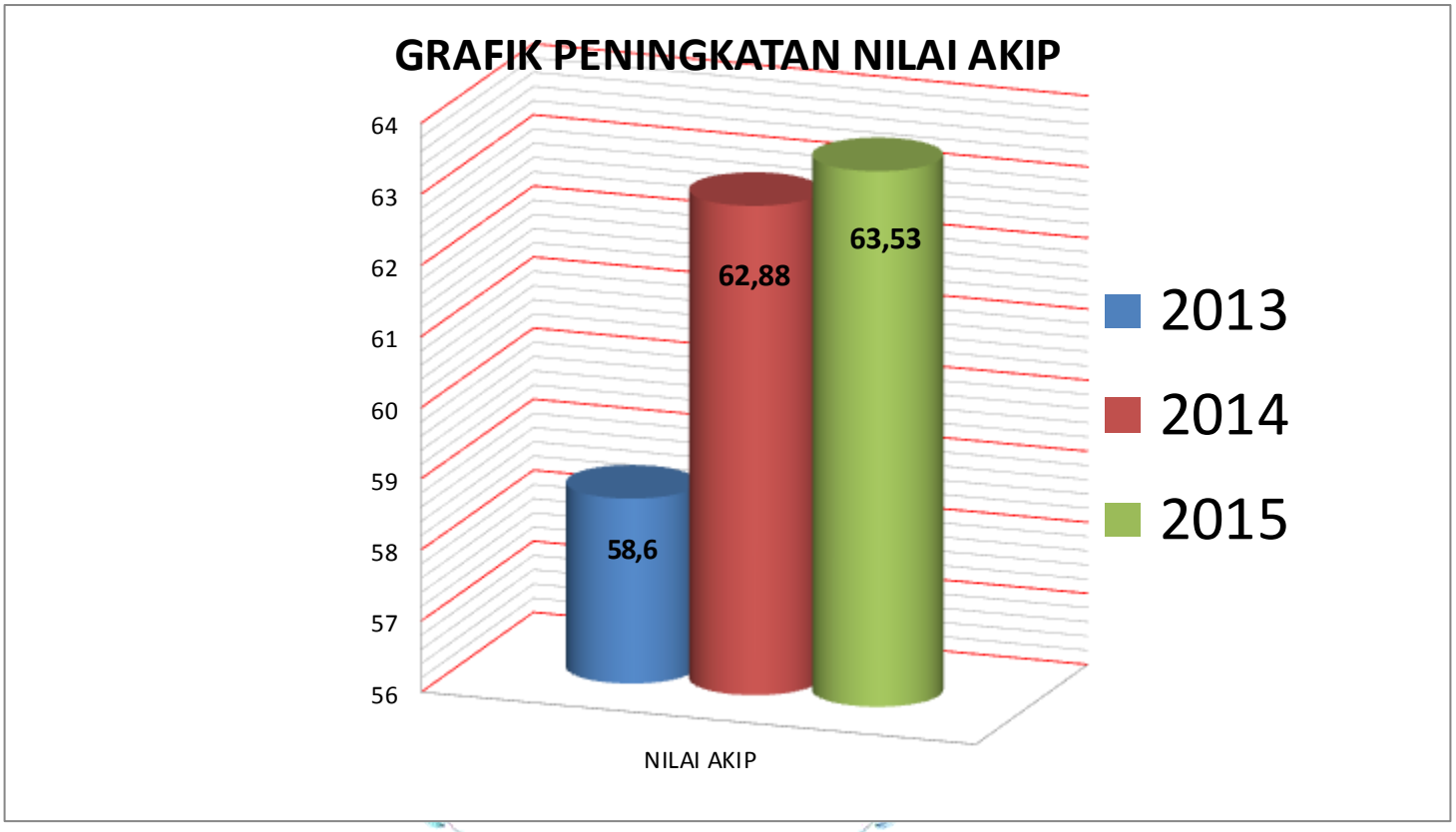

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.

Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 23.053.865.526 atau mencapai 96,47 % dari alokasi anggaran sebesar Rp 23.897.912.043.

Adapun untuk realisasi belanja langsung dan tidak langsung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.26

Realisasi Anggaran BTL dan BL

Kantor Kecamatan Antapani Tahun Anggaran 2018

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	**Belanja Tidak Langsung**			
	Belanja Pegawai – Gaji dan Tunjangan	10.268.254.151	9.914.417.928	95,84%
2	**Belanja Langsung**			
	Belanja pegawai	4.346.490.000	4.201.700.000	96,67%
	Belanja Barang & Jasa	8.162.771.443,51	7.739.109.338	94,81%
	Belanja Modal	983.131.204,32	917.297.500	93,30%
	Total	23.760.646.798,83	22.772.524.766	96,47%

Realisasi belanja barang dan jasa dan belanja modal pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan realisasi pada tahun 2017. Rincian realisasi belanja barang dan jasa dan belanja modal tahun 2018 dan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Kecamatan Antapani Kota Bandung pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.27

Pagu dan Realisasi Anggaran Kecamatan Antapani Kota Bandung

Tahun 2018

No	Program		Pagu Anggaran Tahun 2018	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4	
				Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sasaran 1	**Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik**										
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
	1.1	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kecamatan Antapani)	297.872.800	18.028.271	6.05	53.987.887	18.12	63.740.658	21.4	294.492.494	98.87
	1.2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kel. Antapani Kulon)	37.587.423	1.338.904	3.56	3.797.879	10.1	6.421.285	17.08	21.813.633	58.03
	1.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kel. Antapani Wetan)	27.640.480	3.885.637	14.06	55.990	20.26	5.562.450	20.12	21.159.091	76.55
	1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kel. Antapani Tengah)	38.325.431	4.376.535	11.42	3.584.562	9.35	4.575.340	11.94	181.699	46.97
	1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kel. Antapani Kidul)	30.101.923	2.687.706	8.93	6.750.569	22.43	2.597.384	8.63	21.123.573	70.17
	1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan	11.932.640	1.396.900	11.71	5.434.500	45.54	3.022.900	25.33	10.057.200	84.28

		Kendaraan Dinas/Operasional (Kecamatan Antapani)									
	1.7	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Kecamatan Antapani)	12.000	3000	25	3000	25	4000	33.33	12.000	100
	1.8	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Kel. Antapani Kulon)	6000	1000	16.67	2500	41.67	1500	25	6000	100
	1.9	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Kel. Antapani Wetan)	6000	1500	25	500	8.33	2550	42.5	5550	92.5
	1.10	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Kel. Antapani Tengah)	6000	2000	33.33	1000	16.67	1500	25	6000	100
	1.11	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Kel. Antapani Kidul)	6000	1000	16.67	1500	25	1500	25	6000	100
	1.12	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja (Kecamatan Antapani)	435.400	0	0	0	0	0	0	368.070	84.54
	1.13	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja (Kel. Antapani Kulon)	83.500	0	0	0	0	0	0	41.500	49.7
	1.14	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja (Kel. Antapani Wetan)	44.500	0	0	0	0	4.856.905	109.14	4.301.500	96.66
	1.15	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja (Kel. Antapani Tengah)	101.000	0	0	12.400	12.28	22.900	22.67	100.600	99.6
	1.16	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja (Kel. Antapani Kidul)	74.000	5000	6.76	16.000	21.62	0	0	60.500	81.76

	1.17	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor (Kecamatan Antapani)	86.926.094	41.930.850	48.24	42.190.850	48.54	41.312.160	47.53	84.978.010	97.76
	1.18	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor (Kel. Antapani Kulon)	15.751.863	29.070	18.45	4.938.100	31.35	39.610	25.15	15.751.369	100
	1.19	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor (Kel. Antapani Wetan)	18.664.374	52.000	27.86	47.750	25.58	74.010	39.65	186.640	100
	1.20	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor (Kel. Antapani Tengah)	20.655.658	3.640.046	17.62	4.451.500	21.55	68.300	33.07	20.566.546	99.57
	1.21	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor (Kel. Antapani Kidul)	40.534.904	0	0	0	0	38.600.540	95.23	39.800.540	98.19
	1.22	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Kecamatan Antapani)	1.051.010	44.400	3.81	0	0	3.908.800	3.72	99.574.550	94.74
	1.23	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Kel. Antapani Kulon)	73.740	0	0	0	0	0	0	73.520	99.7
	1.24	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Kel. Antapani Wetan)	21.042.500	10.160	4.83	49.510	23.53	52.200	24.81	210.420	100
	1.25	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Kel. Antapani Kidul)	17.323.150	14.880	8.59	2.088.800	12.06	13.553.050	78.24	17.233.050	99.48
	1.26	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor (Kecamatan Antapani)	16.522.980	0	0	1.557.600	9.43	25.010	15.14	163.120	98.72
	1.27	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor (Kel. Antapani Kulon)	20.090.500	2.285.618	11.38	2.285.618	11.38	0	0	16.393.300	81.6

	1.28	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor (Kel. Antapani Wetan)	6.789.750	9000	13.26	26.800	39.47	0	0	67.080	98.8
	1.29	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor (Kel. Antapani Tengah)	2.972.725	1.527.900	51.4	1.527.900	51.4	5000	16.82	2.971.900	99.97
	1.30	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor (Kel. Antapani Kidul)	9.287.175	774.175	8.34	2.315.975	24.94	1.768.550	19.04	6.994.800	75.32
	1.31	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kecamatan Antapani)	1.567.500	0	0	0	0	0	0	13.710	87.46
	1.32	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Kecamatan Antapani)	19.015.270	0	0	43.780	23.02	20.560	10.81	18.726.600	98.48
	1.33	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Kel. Antapani Kulon)	3.305.500	615.500	18.62	615.500	18.62	4950	14.98	3.305.500	100
	1.34	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Kel. Antapani Wetan)	4.441.510	8980	20.22	14.130	31.81	18.300	41.2	44.330	99.81
	1.35	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Kel. Antapani Tengah)	4.552.500	1650	3.62	1500	3.29	2000	4.39	44.300	97.31
	1.36	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Kel. Antapani Kidul)	39.100	529.500	13.54	1.302.500	33.31	1.294.500	33.11	38.900	99.49
	1.37	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Kecamatan Antapani)	79.800	9450	11.84	15.850	19.86	9950	12.47	58.250	72.99

	1.38	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Kel. Antapani Kulon)	18.960	0	0	3540	18.67	2480	13.08	15.340	80.91
	1.39	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Kel. Antapani Wetan)	43.760	0	0	0	0	0	0	41.600	95.06
	1.40	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Kel. Antapani Tengah)	74.760	3100	4.15	2400	3.21	4000	5.35	11.650	15.58
	1.41	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Kel. Antapani Kidul)	19.800	0	0	0	0	0	0	1800	9.09
	1.42	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman (Kecamatan Antapani)	140.542.513	10.990.125	7.82	34.995.125	24.9	472.700	33.63	137.466.725	97.81
	1.43	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman (Kel. Antapani Kulon)	20.974.400	0	0	33.830	16.13	2.905.800	13.85	20.927.450	99.78
	1.44	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman (Kel. Antapani Wetan)	22.685.050	43.800	19.31	43.800	19.31	0	0	22.407.500	98.78
	1.45	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman (Kel. Antapani Tengah)	205.680	6300	3.06	540	24.33	48.000	23.34	20.480.500	99.57
	1.46	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman (Kel. Antapani Kidul)	28.470.400	0	0	80.260	28.19	8.572.400	30.11	284.260	99.84
	1.47	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Kecamatan Antapani)	1.203.200	103.500	8.6	71.740	5.96	928.010	77.13	1.092.950	90.84
	1.48	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi	4.128.630	591.750	14.33	942.330	22.82	585.000	14.17	3.284.730	79.56

		Perkantoran/ Teknis Perkantoran (Kecamatan Antapani)									
	1.49	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Kel. Antapani tengah)	14.933.455	4.026.924	26.97	15.020	10.06	32.150	21.53	14.921.924	99.92
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										
	2.1	Kegiatan Pengadaan Mebeulair (Kecamatan Antapani)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (Kecamatan Antapani)	4.826.000	985.630	20.42	106.615.600	22.09	88.881.500	18.42	407.771.138	84.49
3	Program peningkatan disiplin aparatur										
	3.1	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Kecamatan Antapani)	275.000	0	0	226.380	82.32	0	0	231.880	84.32
	3.2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	103.592.500	0	0	241.230	23.29	62.277.600	60.12	98.484.100	95.07
4	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan										
	4.1	Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan (Kecamatan Antapani)	55.000	26.250	47.73	51.000	92.73	1500	2.73	52.500	95.45
	4.2	Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan (Kel. Antapani Kulon)	42.460	0	0	0	0	0	0	4.244.450	99.96

	4.3	Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan (Kel. Antapani Wetan)	88.000	16.500	18.75	13.500	15.34	0	0	86.950	98.81
	4.4	Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan (Kel. Antapani Tengah)	75.640	0	0	25.160	33.26	0	0	73.520	97.2
	4.5	Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan (Kel. Antapani Kidul)	78.000	0	0	0	0	0	0	500	64.1
	4.6	Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan (kecamatan Antapani)	450.440	14.044.500	31.18	221.130	49.09	26.000	5.77	385.080	85.49
	4.7	Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan (Kel. Antapani Kulon)	2.237.070	63.800	2.85	495.700	22.16	250.450	11.2	1.629.850	72.86
	4.8	Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan (Kel. Antapani Wetan)	1.466.400	271.000	18.48	361.500	24.65	271.500	18.51	1.464.450	99.87
	4.9	Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan (Kel. Antapani Tengah)	3.422.500	811.000	23.7	749.300	21.89	903.600	26.4	3.421.000	99.96
	4.10	Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan (Kel. Antapani Kidul)	1.268.980	118.550	9.34	531.600	41.89	33.718.750	26.57	126.738.750	99.87
	4.11	Kegiatan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan	84.737.352	219.300	25.88	30.948.400	36.52	14.497.500	17.11	69.432.900	81.94

		Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Kecamatan Antapani)									
	4.12	Kegiatan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Kel. Antapani Kulon)	405.332.065	616.800	15.22	149.261.900	36.82	95.713.200	23.61	401.496.900	99.05
	4.13	Kegiatan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Kel. Antapani Wetan)	451.249.900	1.000.700	22.18	89.251.625	19.78	150.460.900	33.34	450.282.525	99.79
	4.14	Kegiatan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Kel. Antapani Tengah)	347.506.550	81.930.500	23.58	78.335.500	22.54	96.859.250	27.87	342.028.150	98.42
	4.15	Kegiatan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Kel. Antapani Kidul)	4.122.440	625.000	15.16	12500	30.32	130.624.750	31.69	411.874.750	99.91
	4.16	Kegiatan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Kecamatan Antapani)	427.236.763	684.900	16.03	1.331.250	31.16	694.300	16.25	3.965.500	92.82
	4.17	Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan (Kecamatan Antapani)	250.800	65.750	26.22	73.640	29.36	15.000	5.98	28.747.400	114.62
	4.18	Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan (Kel. Antapani Kulon)	290.087.500	135.500	4.67	93.170.150	32.12	1.025.000	35.33	290.062.150	99.99
	4.19	Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan	4.482.560	547.500	12.21	1.215.060	27.11	1.134.000	25.3	4.455.880	99.4

		dan Kelurahan (Kel. Antapani Wetan)									
	4.20	Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan (Kel. Antapani Tengah)	570.210.475	1.094.600	19.2	1.973.520	34.61	228.360.750	40.05	562.182.750	98.59
	4.21	Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan (Kel. Antapani Kidul)	5.673.280	339.800	5.99	2.386.400	42.06	202.440.600	35.68	566.080.600	99.78
	4.22	Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat (Kecamatan Antapani)	108.000	104.000	96.3	105.920	98.07	0	0	105.920	98.07
	4.23	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	391.471.668	37.615.400	9.61	199.488.850	50.96	35.979.200	9.19	338.750.450	86.53
5	Program Perencanaan Pembangunan Daerah										
	Total Per Sasaran		**7.715.476.241**	**10.981.391**	**14.23**	**2.197.642.890**	**28.48**	**2.017.259.722**	**26.15**	**7.247.761.467**	**93.94**
Sasaran 2	**Meningkatnya pemberdayaan masyarakat**										
6	Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan										
	6.1	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW (Kel. Antapani Kulon)	528.693.381	0	0	250.782.455	47.43	220.466.400	41.7	520.968.855	98.54
	6.2	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW (Kel. Antapani Wetan)	964.324.263	0	0	442.456.648	45.88	3.867.100	40.03	918.964.143	95.3

	6.3	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW (Kel. Antapani Tengah)	1.812.655.021	0	0	649.936.210	35.86	848.911.690	46.83	1.785.710.210	98.51
	6.4	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW (Kel. Antapani Kidul)	1.427.887.909	0	0	525.090.500	36.77	607.802.140	42.57	1.410.324.170	98.77
	6.5	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK (Kel. Antapani Kulon)	71.234.600	106.010	14.88	165.620	23.25	118.440	16.63	69.171.652	97.1
	6.6	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK (Kel. Antapani Wetan)	71.234.600	0	0	24.924.600	34.99	460.330	64.62	70.957.600	99.61
	6.7	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK (Kel. Antapani Tengah)	71.234.600	192.070	26.96	19.843.650	27.86	25.037.600	35.15	70.888.250	99.51
	6.8	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK (Kel. Antapani Kidul)	71.234.600	36.000	5.05	72.000	10.11	136.700	19.19	57.829.700	81.18
	6.9	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna (Kel. Antapani Kulon)	95.478.125	0	0	11.899.900	12.46	28.717.500	30.08	85.100.600	89.13
	6.10	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna (Kel. Antapani Wetan)	95.478.125	0	0	0	0	63.037.190	66.02	94.815.522	99.31
	6.11	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna (Kel. Antapani Tengah)	95.478.125	86.150	9.02	315.100	33	215.000	22.52	950.480	99.55
	6.12	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna (Kel. Antapani Kidul)	95.478.125	0	0	0	0	34.560.500	36.2	78.119.500	81.82
	6.13	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM (Kel. Antapani Kulon)	86.296.125	0	0	124.850	14.47	9.515.380	11.03	80.631.700	93.44

	6.14	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM (Kel. Antapani Wetan)	86.296.125	0	0	16.233.200	18.81	443.822	51.43	85.065.702	98.57
	6.15	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM (Kel. Antapani Tengah)	86.296.125	21.082.400	24.43	16.993.400	19.69	29.575.100	34.27	86.022.500	99.68
	6.16	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM (Kel. Antapani Kidul)	86.296.125	0	0	237.731.312	275.48	24.793.560	28.73	82.119.660	95.16
Total Per Sasaran			**5.745.595.974**	**63.105.400**	**1.10**	**2.263.648.875**	**39.40**	**2.415.853.162**	**42.05**	**5.591.737.764**	**97.32**
Grand Total			**13.461.072.215**	**1.161.106.791**	**8.63**	**4.461.291.765**	**33.14**	**4.433.112.884**	**32.93**	**12.839.499.231**	**95.38**

Pencapaian realisasi sebesar 95,74 % ini dianggap cukup tinggi, dan optimal dalam pencapaian kinerja Kecamatan Antapani.

Adapun Pagu dan realisasi anggaran Kecamatan Antapani per sasaran dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.28

Pagu dan Realisasi Anggaran Kecamatan Antapani Kota Bandung persasaran Tahun 2018

No.	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1.	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public	7.715.476.241	7.247.761.467	93,94%
2.	Meningkatknya pemberdayaan masyarakat	5.745.595.974	5.591.737.764	97,32%
	Jumlah	**13.461.072.215**	**12.839.499.231**	**95.38 %**

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direalisasikan sebesar Rp. **12.839.499.231** dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. **13.461.072.215** atau **95,38%** dengan pencapaian sasaran organisasi rata rata sebesar **108,48 %.** Hal tersebut merefleksikan tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Kecamatan Antapani Kota Bandung pada tahun 2018.

Dan untuk melihat Realisasi Pencapaian realisasi Anggaran per Triwulan Kecamatan Antapani dapat dilihat dari table dibawah ini

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Kecamatan Antapani Kota Bandung pada tahun 2017.

Adapun realisasi anggaran pertriwulan pada tahun 2017 untuk mencapai target kinerja adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Kecamatan Antapani Kota Bandung, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2017 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.31

Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi Kecamatan Antapani Kota Bandung Tahun 2017

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Rata rata Presentase Capaian Kinerja	Anggaran	
				Realisasi (Rp.)	%
A.	**Misi 1,**				
1	Melebihi/Melampaui Target	2	**108,48 %**		
2	Sesuai Target	0	0	**12.839.499.231**	**95.38 %**
3	Tidak Mencapai Target	0	0		
4	Tidak dapat diukur	0	0		

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Kecamatan Antapani Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan sudah cukup efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi.

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%, sebagaimana telah dipaparkan diatas.

Untuk misi 1 yaitu realisasi sebesar Rp. 14.570.788.748 dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 15.218.794.682 atau **95,74%** dengan pencapaian sasaran organisasi rata rata sebesar **108,49 %** dari total anggaran yang dialokasikan.

Untuk efisiensi sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yaitu realisasi sebesar Rp. 7.275.724.688 dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 7.807.732.637 atau **93,19%** dengan pencapaian sasaran organisasi sebesar **103,54 %** dari total anggaran yang dialokasikan.

Untuk efisiensi sasaran meningkatnya pemberdayaan masyarakat yaitu realisasi sebesar Rp. 7.306.673.308 dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 7.411.062.045 atau **98,59%** dengan pencapaian sasaran organisasi sebesar **113,44 %** dari total anggaran yang dialokasikan.

Tabel 3.32

Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Kecamatan Antapani
Periode Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan			
					Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	1.1	Rata Rata Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	Angka	80.5	82.76	102.81	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.751.794.468	1.557.331.454	88.90
								2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	482.600.000	407.771.138	84.49
								3 Program peningkatan disiplin aparatur	131.092.500	121.672.100	92.81
								4 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	5.349.989.273	5.160.986.775	96.47
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR					102.81	TOTAL PER SASARAN	7.715.476.241	7.247.761.467	93.94
TINGKAT EFISIENSI 8.87 %											
TINGKAT EFEKTIFITAS 109.44 %											

2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	2.1	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	77.50	88.47	114.15	5	Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	5.745.595.974	5.591.737.764	97.32
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR					114.15		TOTAL PER SASARAN	5.745.595.974	5.591.737.764	97.32
TINGKAT EFISIENSI 16.83 %												
TINGKAT EFEKTIFITAS 117.29 %												
									TOTAL KESELURUHAN	13.461.072.215	12.839.499.231	95.38

3.5 Prestasi dan Penghargaan

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Antapani Kota Bandung dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Kecamatan Antapani Kota Bandung telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan selama kurun waktu 2 (Dua) tahun tersebut, sebagai berikut :

Tabel 3.33

Daftar Prestasi dan Penghargaan yang diperoleh oleh Kecamatan Antapani

NO	NAMA KEJUARAAN/ KEGIATAN	TINGKAT KEJUARAAN/ KEGIATAN	PRESTASI		KETERANGAN
			TAHUN 2017	TAHUN 2018	
1	Lomba Sekolah Sehat	Tingkat SMP se-Kota Bandung	Juara 1		
2	Liga Seni dan Budaya Cabang Rampak Kendang	Tingkat Kecamatan se-Kota Bandung	Juara 1		
3	Top Skor pada Bandung Lautan Bola III Ladies Street Soccer	Tingkat Kota Bandung	Juara 1		
4	Berkinerja Baik Hasil Evaluasi Kinerja Camat dan Lurah	Tingkat Kota Bandung	Juara 4		
5	Lomba Tingkat II Gerakan Pramuka Regu Putri	Kwartir Cabang Kota Bandung		Juara 1	
6	Lomba Tingkat II Gerakan Pramuka Regu Putra	Kwartir Cabang Kota Bandung		Juara 3	

8	Lomba Liwet Kategori Kelurahan	Tingkat kota Bandung		Juara 2	
9	Lomba Foto Bebersih Bandung Kategori Kecamatan	Tingkat kota Bandung		Juara 3	
10	Juara Inovasi Pelayanan publik	Tingkat kota Bandung		10 Besar	
11	Lomba Foto Gerakan Sadar LAPOR	Tingkat kota Bandung		Juara 2	

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Antapani Kota Bandung Tahun 2018 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Antapani Kota Bandung Tahun 2018. Pembuatan LKIP ini merupakan salah satu pertanggung jawaban tahunan, guna menindaklanjuti Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Kecamatan Antapani Kota Bandung Tahun 2018 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Antapani Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2018 Kecamatan Antapani Kota Bandung menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 2 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yaitu realisasi sebesar Rp. 7.275.724.688 dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 7.807.732.637 atau **93,19%** dengan pencapaian sasaran organisasi sebesar **103,54 %** dari total anggaran yang dialokasikan.

Sasaran meningkatnya pemberdayaan masyarakat yaitu realisasi sebesar Rp. 7.306.673.308 dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 7.411.062.045 atau **98,59%** dengan pencapaian sasaran organisasi sebesar **113,44 %** dari total anggaran yang dialokasikan.Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 (dua) sasaran tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran > 85 – 100 yang termasuk dalam Interpretasi *Memuaskan.* Dalam Tahun Anggaran 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Antapani Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 14.724.433.465,00- atau 98,30% dari anggaran sebesar Rp. 14.976.620.613,00-.

Dalam tahun 2018 tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 23.053.865.526 (meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung) secara efektif telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Kecamatan Antapani Kota Bandung.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Antapani Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Antapani Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun fihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

ngahiji bahagia

Bandung, 18 Januari 2019

CAMAT ANTAPANI

Drs. H. Rd. SARJANI SALEH, M.Si
Pembina Tk 1
NIP. 19660225 198812 1 001

LAMPIRAN –LAMPIRAN (EVIDEN)

(EVIDEN)
LAMPIRAN –LAMPIRAN